



MEMPERTAHANKAN TEGAKAN HUTAN

MENGUNGKAP MEREK DAN BANK PEMICU DEFORESTASI



**RAINFOREST
ACTION NETWORK**



MEMPERTAHANKAN TEGAKAN HUTAN

MENGUNGKAP MEREK DAN BANK PEMICU DEFORESTASI

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	3
Mempertahankan Tegakan Hutan dan Menghormati Hak: Suatu Prioritas Global	6
– Hutan untuk Kehidupan dan Mata Pencarian	6
– Masyarakat Adat dan Lokal di Garis Depan Konservasi Dunia	8
Ekspansi Komoditas: Menghancurkan Hutan Hujan Terakhir dan Melanggar Hak Masyarakat Adat dan Lokal	10
Indonesia: Di Garis Depan Deforestasi, Pelanggaran Hak atas Tanah, dan Krisis Iklim	12
– Deforestasi Selama Puluhan Tahun	14
– Hutan Tersisa di Indonesia Terancam	15
Memperjuangkan Hak atas Tanah: Solusi Berbasis Hak untuk Deforestasi dan Krisis Iklim	18
2020: Tahun untuk Memenuhi Janji Hutan	20
Menguak Merek dan Bank yang Memicu Deforestasi	22
– Merek yang Memicu Deforestasi dan Pelanggaran Hak	26
– Bank yang Memicu Deforestasi dan Pelanggaran Hak	28
Menguak Perusahaan Raksasa Kehutanan dan Agribisnis di Garis Depan Deforestasi dan Pelanggaran Hak	31
Lingkaran Kehancuran: Hubungan antara Merek, Bank, dan Raksasa Kehutanan dan Agribisnis	36
2020: Tahun untuk Menjaga Tegakan Hutan dan Membela Hak Masyarakat Adat	38
Referensi	40



425 Bush Street, Suite 300
San Francisco, CA 94108 | RAN.org

Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit di Kawasan Ekosistem Leuser, Sumatra, Indonesia.
FOTO: Paul Hilton / RAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

KITA SEMUA BERGANTUNG PADA HUTAN

Meskipun di belakang rumah Anda terdapat hutan, atau hutan terdekat terletak jauh di belahan dunia yang berbeda, kita semua bergantung pada hutan. Hutan, khususnya lingkaran hutan hujan tropis yang mengelilingi Bumi di garis khatulistiwa, memberikan manfaat penting baik secara lokal maupun global. Bagi jutaan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, hutan adalah rumah, sumber penghidupan, dan tanah kepercayaan dan spiritual mereka. Dengan menjaga hutan, maka mereka menjaga keberlanjutan kelompok dan budayanya. Rimbun dan purba, hutan hujan dunia merupakan rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati bumi yang berada di darat, dan masih banyak lagi spesies tumbuhan dan satwa baru yang hingga kini baru ditemukan ilmuwan. Hutan menstabilkan iklim, menyerap dan menyimpan gas rumah kaca, dan menjaga curah hujan global.

Hutan Indonesia, hutan hujan terluas ketiga di dunia, berperan penting dan unik bagi iklim global maupun krisis keanekaragaman hayati serta 80-95 juta orang yang tinggal di dalam atau dekat hutan¹. Banyak diantara Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang merupakan pembela terdepan melawan deforestasi² telah berhasil mengelola hutan selama turun menurun. Akan tetapi, hutan hujan di seluruh dunia, termasuk hutan hujan di Indonesia, ditebangi untuk komoditas seperti kelapa sawit, pulp atau bubur kertas, kertas, ternak sapi, kedelai, kakao, dan hasil hutan kayu. Merek multinasional menyediakan permintaan pasar untuk produk-produk tersebut, dan pembiayaan untuk kerusakan mengalir dari bank besar di seluruh dunia.

MEREK DAN BANK GAGAL MENGHENTIKAN DEFORESTASI DAN MENGHORMATI HAK

Dalam dekade terakhir, ratusan merek dan bank besar dunia didesak agar membuat komitmen publik untuk menghentikan deforestasi, pembangunan di lahan gambut, dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di dalam portofolio rantai pasok, investasi dan pembiayaannya³. Lebih dari 400 perusahaan dalam Forum Barang Konsumen atau Consumer Goods Forum (CGF), serta bank besar Eropa dan AS yang termasuk dalam Inisiatif Lingkungan Perbankan (Banking Environment Initiative) dan Kesepakatan Komoditas Lunak (Soft Commodities Compact), berkomitmen mencapai nol net deforestasi pada tahun 2020. Semua gagal mencapai targetnya⁴. Dan meskipun adanya komitmen kolektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB untuk menghentikan deforestasi pada tahun 2020, serta Deklarasi New York tentang Hutan untuk menempatkan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal di tengah upaya apa pun untuk melindungi, merestorasi dan mengelola hutan, hak Masyarakat Adat dan lokal terus diabaikan, sedangkan pembela tanah dan lingkungan dihadapi kekerasan dan kriminalisasi yang terus meningkat⁵. Kegagalan merek dan bank dalam menerapkan komitmennya secara efektif turut berkontribusi pada berlanjutnya pelanggaran HAM dan meningkatnya krisis iklim dan keanekaragaman hayati.

Laporan ini memprofilkan sepuluh merek multinasional, tujuh bank besar, dan sepuluh perusahaan kehutanan dan agribisnis yang melalui jaringan interkoneksinya, mewakili beberapa perusahaan paling berpengaruh yang memicu penghancuran hutan hujan dan pelanggaran hak Masyarakat Adat dan lokal. Merek-merek ini merupakan perusahaan barang konsumen multinasional dengan perputaran cepat (fast-moving consumer goods/FMCG) yang terdiri dari Colgate-Palmolive, Ferrero, Kao, Mars, Mondelez, Nestlé, Nissin Foods, PepsiCo, Procter & Gamble, dan Unilever. Bank-bank dalam laporan ini merupakan pusat kekuatan finansial yaitu Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Bank Negara Indonesia (BNI), CIMB, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), DBS, ABN Amro, dan JPMorgan Chase.

Iklim dunia berada di titik kritis berbahaya dan “teknologi alami” hutan merupakan elemen penting dalam solusi nyata apa pun⁶. Hutan dan masyarakat yang berada di garda depan kerusakan hutan kini semakin terancam. Kita masih memiliki peluang untuk melindungi apa yang masih tersisa, namun waktu semakin terbatas. Kita harus menghentikan deforestasi dan ekspansi pembalakan dan perkebunan industrial di dalam hutan hujan tropis terakhir yang ada di Indonesia, Amazon, dan Lembah Kongo, termasuk wilayah yang dikuasai dan dikelola secara tradisional oleh Masyarakat Adat dan masyarakat lokal.

Pemerintah harus menjamin hak legal Masyarakat Adat dan masyarakat lokal atas tanahnya, alih-alih menyerahkan tanah tersebut pada perusahaan untuk produksi kehutanan atau komoditas. Selain itu, merek dan bank harus menjalankan komitmennya dan menyelesaikan persoalan yang mereka turut ciptakan. Melanjutkan bisnis dengan perusahaan yang terlibat dalam deforestasi dan pelanggaran HAM adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Kita bersatu sebagai konsumen dan masyarakat, menyerukan pada merek dan bank bahwa hutan yang penuh kehidupan, masyarakat yang sehat, dan iklim stabil lebih bernilai dibandingkan tujuan keuntungan perusahaan. Kami mendesak perusahaan mengakhiri penghancuran hutan hujan, lahan gambut yang kaya akan karbon, dan pelanggaran HAM. Tahun 2020 adalah tahun untuk menjaga tegakan hutan dan menghormati HAM.

Kita bersatu sebagai konsumen dan masyarakat, menyerukan pada merek dan bank bahwa hutan yang **penuh kehidupan, masyarakat yang sehat, dan iklim yang stabil** lebih bernilai dibandingkan tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

Selama tahun 2020 dan Seterusnya, Merek dan Bank Harus:

- » Mengadopsi dan menerapkan kebijakan Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut dan Nol Eksploitasi (*No Deforestation, No Peatland and No Exploitation/NDPE*) di seluruh rantai pasok, investasi (termasuk usaha gabungan), dan semua jasa keuangan terkait komoditas yang berisiko terhadap hutan, di tingkat grup perusahaan.
- » Mewajibkan semua pemasok, penerima investasi maupun klien mengadopsi dan menerapkan kebijakan NDPE, di tingkat grup perusahaan.
- » Mengetahui dan mengungkapkan secara publik dampak rantai pasok komoditas global, investasi, atau jasa keuangannya terhadap hutan, lahan gambut, dan hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang terganggu akibat pembalakan dan ekspansi perkebunan industrial.
- » Mewajibkan pembuktian penuh akan kepatuhan terhadap undang-undang, regulasi, dan proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) untuk semua area di bawah manajemen dan kontrol grup perusahaan. Pemasok, penerima investasi, dan klien harus sepenuhnya menunjukkan bagaimana hak semua Masyarakat Adat dan masyarakat lokal terdampak dihormati, khususnya hak atas proses PADIATAPA untuk pembangunan baru maupun yang sudah berjalan yang berdampak terhadap mereka.



Sungai yang mengalir di Kawasan Ekosistem Leuser, Sumatera, Indonesia.
FOTO : Paul Hilton / RAN

- » Menetapkan sistem pemantauan dan uji tuntas hutan dan HAM yang kuat untuk mengidentifikasi area ekspansi dan masyarakat terdampak dan merespons cepat terhadap kegiatan berbahaya terkait pemasokan, investasi, atau jasa keuangan guna menghentikan deforestasi, pembukaan lahan gambut, dan pelanggaran HAM.
- » Berhenti memasok komoditas dari, berinvestasi di, atau menyediakan jasa keuangan bagi grup perusahaan yang terlibat dalam deforestasi, pembukaan lahan gambut dan pelanggaran HAM, atau menjamin komitmen yang kredibel dan terikat waktu, guna memastikan pemasok, penerima investasi, dan klien melaksanakan tindakan perbaikan dan memulihkan dampak negatif secara transparan.
- » Memberlakukan prosedur nol toleransi dalam rantai pasok, investasi dan/atau portfolio pendanaan untuk mencegah kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, dan pembunuhan pembela HAM, tanah, dan lingkungan.
- » Memverifikasi secara independen dan mengungkapkan kemajuan pemenuhan kebijakan NDPE pada akhir tahun 2020.
- » Melakukan advokasi terhadap undang-undang dan peraturan pendukung di negara produsen dan konsumen yang menanggapi penyebab mendasar deforestasi, pembukaan lahan gambut, dan pelanggaran HAM, serta mewajibkan perusahaan memastikan rantai pasok, investasi, dan jasa keuangannya tidak mengakibatkan dampak lingkungan dan sosial yang buruk.

MEMPERTAHANKAN TEGAKAN HUTAN DAN MENGHORMATI HAK:

Suatu Prioritas Global

HUTAN UNTUK KEHIDUPAN DAN MATA PENCAHARIAN

Ilmuwan terkemuka mengatakan, “Masa depan iklim planet kita tidak terpisahkan dari masa depan hutannya”⁷. Hal ini berlaku baik bagi 1,6 miliar penduduk yang tinggal di 300 kota terbesar di dunia⁸, maupun 1,6 miliar orang yang tinggal di sekitar dan bergantung pada hutan untuk mata pencahariannya⁹. Bagi banyak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, hutan berada dalam inti kehidupan individu, keluarga, dan masyarakatnya. Hutan penting dalam memastikan keberlanjutan beragam budaya¹⁰. Menjaga hutan yang sehat dapat berkontribusi pada sebagian besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, termasuk di antaranya mengentaskan kemiskinan, menjamin keamanan pangan, menyediakan air bersih, energi, pertumbuhan ekonomi (jika dilakukan secara berkelanjutan), dan merupakan 22,2% pendapatan rumah tangga di negara berkembang¹¹.

Mulai dari keberlangsungan budaya hingga udara segar yang kita hirup dan air bersih yang kita minum, hutan adalah fondasi semua kehidupan di Bumi. Secara global, hutan menghasilkan oksigen dan curah hujan, mengatur suhu global dan menyerap karbon dalam jumlah besar dari atmosfer yang merupakan salah satu pendorong utama perubahan iklim, dan menyimpannya dengan aman dalam tanah. Lahan gambut, merupakan lahan basah yang terbentuk dari dan mendukung banyak hutan hujan tropis, merupakan penyimpan karbon alami daratan terbesar di dunia¹². Hutan adalah ekosistem terestrial dengan keanekaragaman tertinggi di Bumi, yang merupakan tempat tinggal sebagian besar organisme daratan di Bumi¹³. **Kita harus menjaga tegakan hutan untuk menjaga iklim yang stabil, melindungi keanekaragaman hayati dunia yang tersisa, dan mendukung jutaan Masyarakat Adat dan lokal yang sejahtera.**

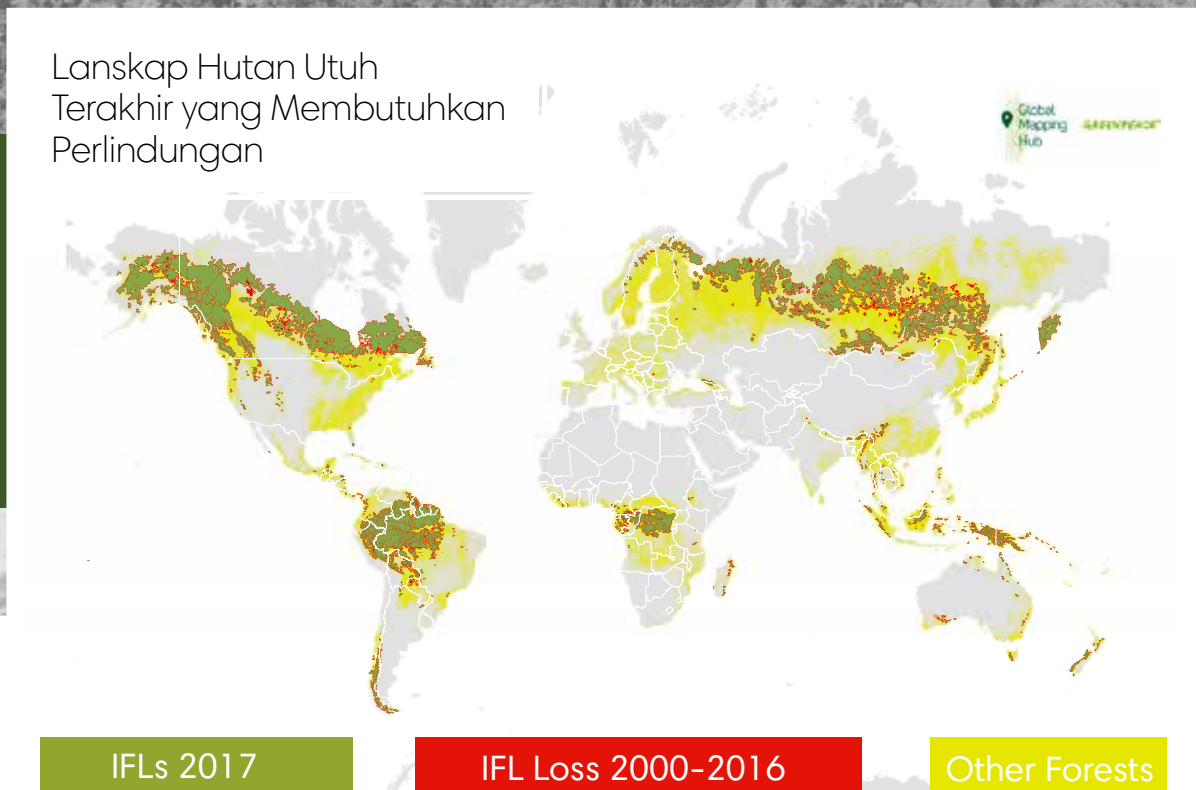


Masyarakat menjalankan pertanian skala kecil di Kawasan Ekosistem Leuser; Hutan hujan dataran rendah di wilayah Singkil-Bengkung, Kawasan Ekosistem Leuser, Sumatra, Indonesia. FOTO: Paul Hilton / RAN



Akan tetapi, luas hutan yang utuh terus menyempit di seluruh dunia. Peta di bawah ini menunjukkan hutan terakhir yang masih tersisa dan paling sedikit terganggu oleh manusia¹⁴. Dengan luas 11,62 juta km² — atau kurang dari 10% daratan Bumi yang tidak tertutup es — hutan ini merupakan pertahanan terakhir manusia melawan hilangnya keanekaragaman hayati dan krisis iklim. Hutan ini harus dilindungi dari penebangan, fragmentasi atau degradasi yang menghancurkan hutan secara perlahan melalui pemanfaatan berlebihan¹⁵.

PETA 1: Luas Lanskap Hutan Utuh pada tahun 2016 mencapai 11,61 juta km²¹⁶



PETA: 2008 Tim Pemetaan IFL: Greenpeace, Universitas Maryland, Transparent World, World Resources Institute, WWF Rusia, Wildlife Conservation Society. Hasil / laporan bisa dilihat di: www.IntactForest.org

Kita terus kehilangan hutan hujan tropis dengan laju yang mengkhawatirkan, yaitu seluas satu lapangan sepak bola per detik¹⁷. Kurang dari 50% hutan hujan tropis dunia yang masih tersisa¹⁸. Hal ini berdampak luar biasa terhadap iklim global. Jika deforestasi tropis merupakan suatu negara, emisi yang dihasilkannya berada pada urutan ketiga tertinggi di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun emisi akibat deforestasi semakin memburuk, dengan peningkatan dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir¹⁹. Suatu lingkaran pembawa petaka yang semakin kuat tercipta: perusakan hutan hujan dan lahan gambut kaya akan karbon melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, dan di saat yang bersamaan, menghilangkan fungsi tegakan pohon dan lahan gambut yang dapat menyerap karbon tersebut dan menyimpannya dengan aman di dalam permukaan tanah.

Walaupun deforestasi merupakan penyumbang krisis iklim yang signifikan saat ini, perlindungan dan restorasi hutan berperan luar biasa besar sebagai solusinya. Menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/ IPCC) – otoritas perubahan iklim yang diakui dunia – mengurangi deforestasi dan degradasi ekosistem alami adalah salah satu cara paling efektif untuk memitigasi perubahan iklim global, dan berpotensi mengurangi sepertiga dari emisi global gas rumah kaca²⁰. Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa ilmuwan terkemuka dunia, "Saat ini hutan sebagai 'teknologi alami' merupakan satu-satunya cara yang terbukti menghilangkan dan menyimpan CO₂ atmosfer pada skala yang dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai keseimbangan karbon"²¹.

MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL DI GARIS DEPAN KONSERVASI DUNIA

Salah satu pertahanan terbaik melawan deforestasi sudah lama terbukti. Dalam Laporan Khusus tentang Perubahan Iklim dan Lahan, IPCC mengonfirmasi apa yang telah lama ditunjukkan Masyarakat Adat dan sejarah, yaitu bahwa Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang kuat dan terorganisir adalah pertahanan kunci melawan deforestasi²². Masyarakat Adat dan lokal telah berhasil melindungi dan mengelola wilayahnya selama berbagai generasi. Walaupun hanya mengelola 22% dari luas daratan Bumi, wilayah adat melindungi 80% dari keanekaragaman hayati planet ini²³. Berbagai studi menunjukkan bahwa penguatan hak Masyarakat Adat akan tanahnya berpotensi mengurangi emisi karbon sebesar 200 gigaton pada tahun 2050, atau jumlah yang sama yang diperkirakan akan dihasilkan Amerika Serikat dalam jangka waktu yang sama²⁴. Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Victoria Tauli-Corpuz, menyatakan dengan jelas, “[Masyarakat Adat] berdiri sebagai solusi perubahan iklim yang telah terbukti selama turun temurun, dan kami dapat terus melanjutkan ini untuk generasi di masa mendatang”²⁵.

Hak Masyarakat Adat atas tanah diabadikan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP). Diadopsi pertama kali tahun 2007 secara internasional, UNDRIP tetap menjadi kerangka paling komprehensif mengenai hak-hak Masyarakat Adat²⁶. Dalam Pasal 25 dan 26, UNDRIP secara khusus menggarisbawahi hak Masyarakat Adat untuk memiliki, memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai tanah yang mereka miliki atau huni secara tradisional, dan berhak menjaga dan memperkuat hubungan spiritualnya dengan tanah yang telah mereka miliki atau duduki secara tradisional dan menegaskan hak tersebut untuk generasi masa depan²⁷.

Selain itu, UNDRIP dengan jelas menguraikan hak PADIATAPA Masyarakat Adat, yaitu hak memberikan atau tidak memberikan persetujuannya untuk proyek apa pun yang dapat berdampak terhadap mereka atau tanahnya²⁸. Hak ini paling sering dilanggar saat kepentingan korporasi dan pemerintah sejalan dalam mengabaikan hak Masyarakat Adat dan lokal atas tanah dan mempermainkan proses perizinan untuk memperoleh izin pengembangan konsesi pembalakan atau perkebunan industrial. Hal ini terjadi di seluruh dunia, di mana sebagian besar perkebunan industrial dunia dilakukan atas “perampasan tanah”, atau peminjaman lahan luas kepada perusahaan, yang sering kali dipicu oleh korupsi²⁹.

Setelah hak atas PADIATAPA dilanggar dan menghadapi perampasan tanah skala besar terhadap tanah yang mereka miliki secara tradisional, Masyarakat Adat dan lokal kerap berada di garis depan deforestasi untuk perkebunan industrial. Saat mereka mendesak haknya dan berupaya melindungi tanah dan hutannya, mereka dihadapi dengan intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan. Terlalu sering, pembela Masyarakat Adat dan lokal melakukan semua ini dengan mempertaruhkan nyawanya³⁰. Situasi ini sudah begitu parah sehingga Masyarakat Adat dan lokal bersatu untuk mendesak pemerintah dan sektor swasta agar menerapkan prosedur nol toleransi di dalam yurisdiksi politiknya, atau dalam rantai pasok, investasi, atau portofolio pembiayaannya guna menghindari intimidasi terhadap dan pembunuhan pembela tanah dan lingkungan³¹.

Kita harus mendukung Masyarakat Adat dan masyarakat lokal dalam perjuangannya memperoleh hak legal atas tanahnya dan memastikan mereka mampu melindungi dan mengelolanya, menjaga cara hidup mereka dan mengamankan sebagian besar keanekaragaman hayati Bumi dari ambang kepunahan. Dengan mendukung mereka yang melindungi hutan, maka kita dapat memperlambat dampak terburuk deforestasi dan perubahan iklim.

Solusi Palsu: ‘Fortress Conservation’ dengan Mengorbankan Hak atas Tanah

Praktik “*fortress conservation*”, yaitu mengeluarkan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal dari tanahnya sebagai upaya menciptakan ekosistem tanpa manusia, sejak lama menjadi pilihan beberapa LSM yang berfokus pada konservasi dan pemerintah yang mengabaikan kedaulatan Masyarakat Adat dan lokal. Taman nasional mungkin saja disebut sebagai ‘ide terbaik Amerika’, namun awalnya taman nasional didirikan dengan merelokasi Masyarakat Adat dan lokal yang sering dilakukan secara brutal³². Model ini telah direplikasi di seluruh dunia, dengan dampak serupa menghancurkan Masyarakat Adat dan lokal³³. Apa pun manfaat yang diberikan taman nasional dan bentuk lain dari *fortress conservation*, model ini semakin mendorong terjadinya pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, dengan hasil yang lebih buruk bagi hutan, keanekaragaman hayati, dan mitigasi iklim dibandingkan ekosistem hutan yang berhasil dikelola oleh Masyarakat Adat dan lokal³⁴. *Fortress conservation* adalah solusi palsu dan seluruh dunia harus meninggalkannya demi pendekatan konservasi hutan berbasis hak³⁵.



(ATAS, TENGAH) Masyarakat Batak di Danau toba telah berjuang mengamankan hak atas tanah mereka dari perusahaan pulp dan kertas Toba Pulp Lestari selama lebih dari 20 tahun. **FOTO** : Agusriady Saputra / RAN; (BAWAH) Masyarakat menjalankan pertanian skala kecil di Kawasan Ekosistem Leuser. **FOTO** : Paul Hilton / RAN

EKSPANSI KOMODITAS:

Menghancurkan Hutan Hujan Terakhir dan Melanggar Hak Masyarakat Adat dan Lokal

Empat puluh persen deforestasi global dihasilkan dari produksi komoditas, dengan produk utama berupa kelapa sawit, pulp, kertas, ternak sapi, kedelai, kakao, dan hasil hutan kayu³⁶. Rangkaian komoditas ini disebut komoditas “berisiko terhadap hutan”, karena diproduksi dengan mengorbankan hutan. Dibangunnya jalan ke dalam hutan menyebabkan meluasnya deforestasi, menyediakan akses lebih mudah bagi pembalakan liar dan kegiatan lainnya, menciptakan fragmentasi hutan, dan memecah belah habitat dan memutus jalur migrasi satwa liar yang penting.

Merek dan bank besar meninggalkan “jejak hutan” yang masif. Jejak hutan mempertimbangkan dampak keseluruhan dari merek dan bank terhadap hutan dunia melalui pembiayaan dan konsumsi komoditas berisiko terhadap hutan. Jadi bagaimana merek dan bank berdampak terhadap hutan hujan tropis dan lahan gambut?



MEREK:

1. Menciptakan peningkatan permintaan pasar akan produksi komoditas murah yang berisiko terhadap hutan, seperti kelapa sawit, pulp dan kertas, kedelai, dan ternak sapi, melalui manufaktur dan transportasi barang konsumen dengan perputaran cepat, atau produk yang dijual dengan cepat dan relatif murah.
2. Memasok secara langsung komoditas berisiko terhadap hutan dari perusahaan kehutanan dan agribisnis, termasuk bahan baku yang tidak dapat ditelusuri. Perusahaan kerap memasok bahan yang mereka tidak ketahui di mana ditanamnya atau apakah bahan tersebut diproduksi dengan mengorbankan hutan, lahan gambut, atau HAM.
3. Memasok secara tidak langsung dari pemasok pihak ketiga, atau perusahaan produsen yang beroperasi di perkebunan atau pabrik pemrosesan yang menyebabkan deforestasi dan pelanggaran HAM.
4. Berinvestasi atau bermitra usaha dengan perusahaan kehutanan atau agribisnis lainnya yang terlibat dalam sektor berisiko terhadap hutan, seperti melalui kemitraan usaha gabungan.

BANK:

1. Menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit bagi perusahaan yang terlibat dalam produksi komoditas berisiko terhadap hutan, seperti kelapa sawit, pulp dan kertas, kedelai, ternak sapi, dan hasil hutan kayu. Bank membiayai perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendukung operasi hariannya, seperti misalnya membeli alat berat untuk menebang dan membuka hutan, mengembangkan pembibitan kelapa sawit, atau merawat dan memanen perkebunan agribisnis.
2. Menerbitkan obligasi dan saham atas nama perusahaan berisiko terhadap hutan untuk membantunya mengembangkan modal untuk melakukan ekspansi. Investasi dapat digunakan untuk memperoleh lahan dan kawasan hutan baru, membiayai merger dan akuisisi perusahaan, restrukturisasi utang perusahaan, atau mendirikan pabrik dan penyulingan yang digunakan dalam pemrosesan komoditas untuk memasok rantai pasok global.
3. Menyediakan pembiayaan bagi perusahaan di ‘hilir’, terlibat dalam perdagangan dan ritel komoditas berisiko terhadap hutan. Ini mencakup pembiayaan pengiriman dan perdagangan komoditas yang telah diproses dan memberikan pembiayaan korporat umum bagi merek yang memanufaktur dan menjual barang konsumen menggunakan komoditas berisiko terhadap hutan.



Masuknya perkebunan industrial ke dalam hutan yang dikelola secara tradisional oleh Masyarakat Adat atau masyarakat lokal menghasilkan sejumlah dampak merugikan. Konflik dengan masyarakat sering terjadi dengan dilanggarnya hak-hak Masyarakat Adat yang ditetapkan dalam UNDRIP, khususnya hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Selain itu, pembela tanah dan lingkungan, banyak yang merupakan Masyarakat Adat dan lokal, menghadapi kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi yang semakin meningkat. Menurut Business and Human Rights Resource Centre, lebih dari 2.000 serangan terhadap pembela tanah dan lingkungan terjadi di seluruh dunia sejak tahun 2015, di mana pada tahun 2019 saja terjadi 572 serangan. Mereka menemukan bahwa serangan-serangan tersebut sering terjadi “dalam konteks model ekonomi yang memprioritaskan investasi dan keuntungan dibandingkan penghormatan HAM dan perlindungan lingkungan”³⁷. Pembela lingkungan yang juga merupakan anggota Masyarakat Adat dibunuh dengan tingkat yang mengerikan dan jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, yaitu 40% dari semua pembunuhan yang terjadi di dunia pada tahun 2015 dan 2016, dan 30% dari pembunuhan tahun 2017³⁸. **Eksansi perkebunan industrial bukan hanya salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi, namun juga menjadi faktor di belakang kekerasan yang dihadapi Masyarakat Adat dan lokal.** Agribisnis adalah sektor tertinggi kedua setelah pertambangan yang bertanggung jawab akan hampir semua pembunuhan terhadap pembela lingkungan³⁹.

Apa yang dimaksud dengan “jejak hutan”?

Jejak hutan adalah luas total dari hutan dan lahan gambut yang telah, atau berpotensi, terdampak oleh konsumsi suatu merek atau pendanaan suatu bank atas komoditas yang berisiko terhadap hutan. Jejak hutan suatu merek atau bank mencakup kontribusi mereka terhadap pengrusakan hutan dan lahan gambut yang dilakukan oleh pemasok atau klien mereka sepanjang periode hubungan bisnis berlangsung, serta wilayah yang masih terancam dalam rantai pasok global dan wilayah sourcing semua pemasok dan klien atas komoditas yang berisiko terhadap hutan. Jejak hutan juga mencakup dampak suatu merek atau bank terhadap hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal pada wilayah hutan dan lahan gambut yang dikelola secara tradisional.

Jejak hutan mencakup luas hutan dan lahan gambut yang telah ditebang, atau yang masih berdiri tegak atau utuh tapi masih terancam deforestasi atau degradasi. Wilayah yang terancam termasuk hutan atau lahan gambut yang berada dalam wilayah pembangunan perkebunan dibawah kendali pemasok, penerima investasi atau klien; wilayah dibawah kendali pemasok pihak ketiga; dan wilayah yang dialokasikan untuk pembalakan atau pembangunan perkebunan di masa depan yang berada dalam wilayah pasok sekitar pabrik, penyulingan atau fasilitas pemrosesan yang masuk dalam rantai pasok globalnya. Semua hal ini harus diketahui dan diungkap secara publik.





Analisis ini dilakukan berdasarkan kerangka hukum Indonesia saat ini. Opini yang dituliskan bersifat umum, dan tidak menghapus keperluan untuk riset lebih dalam terkait kasus yang bersifat spesifik dengan pertimbangan waktu dan tempat dimana pelanggaran hukum dilakukan.

INDONESIA:

Di Garis Depan Deforestasi, Pelanggaran Hak atas Tanah, dan Krisis Iklim

Dengan 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan populasi tertinggi keempat di dunia. Selain Amazon dan hutan hujan di Lembah Kongo, hutan hujan Indonesia adalah salah satu dari tiga hutan hujan tropis penting yang tersisa di Bumi, dimana hampir dari setengah wilayahnya merupakan hutan, yang secara umum dikategorikan sebagai hutan primer dan sekunder⁴⁰. Pulau-pulau Indonesia juga memiliki sekitar puluhan juta hektar wilayah Masyarakat Adat dan lokal, di mana saat ini 7,8 juta hektar di antaranya merupakan hutan adat yang telah dipetakan oleh masyarakat sipil⁴¹.

Hutan hujan Indonesia khususnya memiliki peran penting melawan perubahan iklim dan krisis hilangnya keanekaragaman hayati global serta mendukung perjuangan hak tanah adat. Di seluruh dunia, kerusakan alam terus meningkat pada laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laju kepunahan terus meningkat dengan satu juta spesies flora dan fauna berada diambang kepunahan, terbanyak dalam sejarah manusia⁴². Populasi spesies ikonik yang tersisa bertahan hidup di hutan hujan tropis dataran rendah yang terancam di Sumatera, Kalimantan, dan Papua⁴³. Tetapi, jika hak Masyarakat Adat dan lokal dilanggar dan hutan hujan Indonesia dihancurkan, maka semua ini menjadi bom waktu iklim yang terus berdetak.

Indonesia adalah penghasil gas rumah kaca terbesar kelima di dunia akibat emisi dari konversi hutan dan lahan gambut yang kaya akan karbon menjadi perkebunan kelapa sawit atau Hutan Tanaman Industri (HTI) baru⁴⁴. Indonesia juga merupakan penyumbang besar terhadap pasokan global komoditas yang berisiko terhadap hutan, sebagian besar karena perusahaan kehutanan dan agribisnis masif melakukan pembukaan hutan secara luas dalam beberapa dekade terakhir. Perusahaan kehutanan dan agribisnis tersebut menggantikannya dengan perkebunan monokultur, berikut fasilitas pengolahan pulp, kayu, dan kelapa sawit di sekitarnya, hingga mendorong permintaan untuk ekspansi menjadi lebih luas.

Pembiayaan dari bank global dan meningkatnya permintaan akan komoditas murah dan bahan bakar nabati (biofuel) mendorong ekspansi perkebunan ke dalam bentang hutan hujan dan tanah luas yang dimiliki dan dikelola secara tradisional oleh Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Adanya ratusan kasus konflik antara perusahaan pulp dan kertas dengan masyarakat menjadi sorotan pelanggaran hak tradisional atas tanah yang tak terhitung jumlahnya^{45 46}. Perampasan tanah ini berakar pada kegagalan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan hak Masyarakat Adat dan lokal atas tanah serta lemahnya penegakkan peraturan tentang proses perizinan yang tidak transparan dan diduga kuat dilanggar oleh perusahaan dengan memanipulasi informasi dan proses administrasi. Dengan menetapkan konsesi perkebunan di areal yang tumpang tindih dengan tanah yang dimiliki dan dikelola secara tradisional, pemerintah tidak dapat memastikan bahwa perusahaan menghormati hak Masyarakat Adat dan lokal untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas pembangunan yang dilakukan di tanahnya. Tanpa akses ke tanah yang dimiliki secara tradisional, Masyarakat Adat dan lokal akan kehilangan mata pencaharian termasuk kemampuan untuk bertani, berburu, dan meramu, serta kehilangan budaya karena tidak mampu menjamin masa depan yang berkelanjutan untuk anak dan generasi masa depannya.

Hutan hujan Indonesia adalah
**pusat keanekaragaman
hayati** ditengah **krisis
keanekaragaman hayati
global.**



Hutan yang habis dibabat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, Provinsi Papua, Indonesia; Macan dahan;
FOTO: PhotocechCZ / Shutterstock; Sungai di Kawasan Ekosistem Leuser. **FOTO:** Paul Hilton / RAN

DEFORESTASI SELAMA PULUHAN TAHUN

Selama dua dekade terakhir, Indonesia kehilangan hampir 25 juta hektar tutupan pohon untuk selamanya, dimana lebih dari 9.154.000 hektarnya merupakan hutan primer⁴⁷. Demikian pula, hamparan luas dari 22 juta hektar lahan gambut Indonesia^{48 49}, telah terdegradasi oleh ekspansi pembalakan dan perkebunan industrial. Pada tahun 2018 saja, lebih dari 339.888 hektar hutan primer dihancurkan⁵⁰. Dampaknya luar biasa terhadap keanekaragaman hayati Indonesia, di mana 191 spesies mamalia, 160 burung, 166 ikan, dan 458 tumbuhan terancam punah masuk ke dalam Daftar Merah IUCN⁵¹, termasuk di antaranya harimau, badak, dan gajah Sumatera, orangutan Tapanuli, Sumatera, dan Borneo. Orangutan Tapanuli adalah kera besar paling terancam punah di dunia meski baru saja ditetapkan oleh ilmuwan sebagai spesies baru pada tahun 2017⁵².

Hutan Indonesia yang penuh kehidupan saat ini dikonversi menjadi perkebunan industrial kelapa sawit dan pulp dan kertas, dua tipe perkebunan yang merupakan faktor pendorong deforestasi terbesar di Indonesia, di mana hanya sedikit keanekaragaman hayati dapat bertahan hidup. Pembalakan legal dan ilegal juga berperan besar dalam persoalan ini. Pembalakan menyebabkan fragmentasi dan degradasi hutan yang sebelumnya utuh, dan sering kali berujung pada kawasan tersebut dialokasikan untuk konversi menjadi area pemanfaatan lainnya. Sampai saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia telah mengalokasikan lebih dari 11 hektar lahan kepada produsen pulp dan perusahaan kehutanan komersial lainnya dalam bentuk izin konsesi perkebunan HTI⁵³. Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 22,2 juta hektar, di mana 2,3 juta hektar berada di dalam Kawasan Hutan, dan lebih dari setengahnya dikuasai oleh perusahaan atau investor besar⁵⁴. Diperkirakan bahwa lebih dari 17 juta hektar telah ditanami kelapa sawit⁵⁵. Sekitar 45 persen dari pemasok minyak kelapa sawit di Indonesia merupakan perkebunan rakyat⁵⁶. Laporan terkait luas area dari kebun milik petani mandiri berbasis rumah tangga berkisar antara dua sampai lima juta hektar⁵⁷. Selain itu, jumlah perusahaan kecil dan menengah terus meningkat, dimana dalam beberapa kasus mereka bertindak sebagai 'perusahaan bayangan' bagi grup perusahaan yang lebih besar.

Hutan Indonesia yang penuh kehidupan saat ini dikonversi menjadi perkebunan industrial **kelapa sawit, pulp dan kertas, dua tipe perkebunan yang merupakan faktor pendorong deforestasi terbesar di Indonesia**, di mana hanya sedikit keanekaragaman hayati dapat bertahan hidup.

FOTO: Paul Hilton / RAN

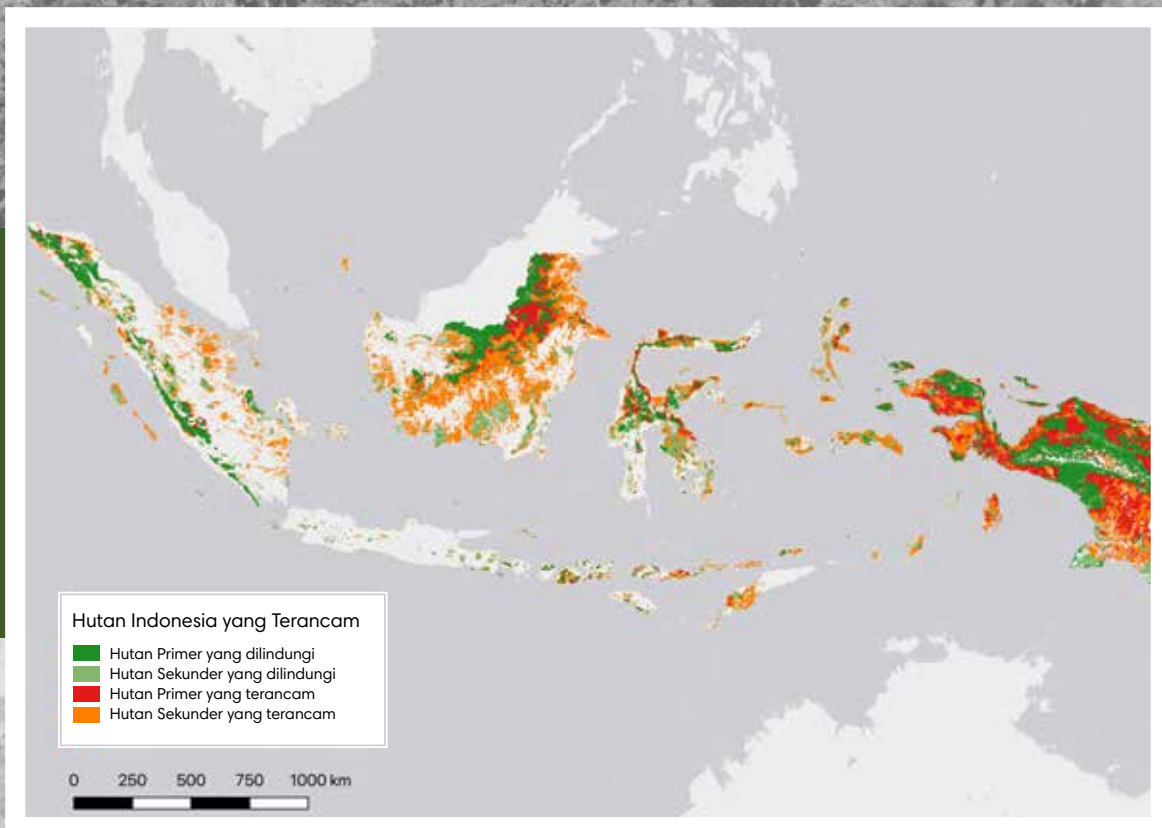
HUTAN TERAKHIR DI INDONESIA TERANCAM

Konversi hutan dalam skala luas untuk perkebunan kayu dan kelapa sawit terus menjadi ancaman serius terhadap hutan hujan Indonesia yang tersisa, di antaranya hutan utuh di Papua Barat, Papua, Kawasan Ekosistem Leuser dan provinsi sepanjang perbatasan Kalimantan bagian utara di Borneo.

Pemerintah Indonesia menetapkan 120,6 juta hektar sebagai Kawasan Hutan, dengan 67,4 juta hektar dikelola untuk berbagai penggunaan lainnya (Areal Penggunaan Lain/APL), termasuk untuk produksi komoditas⁵⁸. Di dalam Kawasan Hutan, lebih dari 50 juta hektar dikelola untuk konservasi beragam spesies tumbuhan dan satwa endemik Indonesia dan juga untuk melindungi nilai ekologi lainnya, seperti produksi air bersih dan mitigasi banjir atau intrusi air laut⁵⁹. Selain itu, 68,8 juta hektar ditetapkan sebagai Hutan Produksi dan tersedia untuk berbagai operasi pembalakan dan kehutanan, termasuk konversi hutan alam menjadi HTI. Lebih dari 1,5 juta hektar hutan primer dan 5,4 juta hektar hutan sekunder berada di luar klasifikasi Kawasan Hutan dan termasuk dalam APL, termasuk lahan yang dialokasikan untuk konversi menjadi perkebunan kelapa sawit⁶⁰. Alokasi legal ini untuk pembalakan dan ekspansi komoditas pertanian, disertai pembalakan liar dan pengembangan perkebunan akibat korupsi dan tata kelola hutan yang lemah berujung pada hilangnya ratusan juta hektar hutan hujan setiap tahunnya⁶¹.

Peta berikut ini menunjukkan hutan hujan tropis yang dialokasikan pemerintah Indonesia untuk pembalakan dan konversi menjadi HTI dan perkebunan kelapa sawit. Letaknya yang berdekatan dengan pabrik pengolahan perusahaan kehutanan dan agribisnis membuat hutan-hutan ini terancam risiko deforestasi karena ekspansi kegiatan pembalakan dan produksi komoditas.

PETA 2: Hutan hujan Indonesia terancam deforestasi dari ekspansi kegiatan pembalakan, kehutanan, dan pertanian industrial di Indonesia.



PETA: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tutupan Lahan, 2017. Fungsi Hutan dan Lahan, 2018.

Deforestasi akan terus berlanjut selama puluhan tahun ke depan. Pemerintah Indonesia menyatakan laju deforestasi untuk 'Bisnis seperti Biasa' mendekati satu juta hektar (0,92 juta ha) per tahun, terdiri dari deforestasi yang direncanakan maupun tidak direncanakan atau ilegal⁶². Untuk dekade berikutnya, diperkirakan deforestasi nasional akan berada pada laju 0,82 juta hektar per tahun, meningkat dari laju deforestasi yang sempat menurun di tahun 2015 saat pemerintah menerapkan regulasi dan moratorium perlindungan hutan primer dan lahan gambut, serta mengurangi konversi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan industrial⁶³. Sulit untuk mengetahui hutan, Masyarakat Adat atau masyarakat lokal mana yang akan terdampak paling parah oleh deforestasi terencana ini dikarenakan kurangnya transparansi dalam proses administrasi yang mengatur penerbitan izin eksplorasi dan pengembangan lahan.

Setelah puluhan tahun tata kelola dan penegakan yang lemah, ditambah dengan pertumbuhan cepat sektor kehutanan dan perkebunan Indonesia, mengakibatkan persoalan ekonomi yang berakar. Persoalan ini mencakup kerugian pendapatan pemerintah⁶⁴ dan kepemilikan tanah dan sumber daya yang terkonsentrasi secara ekstrem oleh segelintir taipan dengan koneksi politik.⁶⁵ Sumbangan ekonomi dari sektor kehutanan dan agribisnis juga semakin diperkecil oleh efek jangka panjang drainase lahan gambut, yang menyebabkan subsidensi tanah, kebakaran lahan dan asap lintas negara. Kebakaran saja diperkirakan mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian sebesar 5 milyar USD pada tahun 2019 dan 16 miliar USD pada tahun 2015⁶⁶.

Pemerintah Indonesia sedang berupaya meningkatkan lapangan kerja dan investasi melalui deregulasi serentak, yang mengancam perlindungan hak atas tanah dan hak buruh serta meningkatkan tekanan terhadap hutan dan lingkungan di Indonesia. Agenda deregulasi ini disusun dengan latar belakang upaya pemerintah yang dianggap melemahkan niat untuk melindungi HAM dan melawan korupsi⁶⁷.

Usulan perubahan terkait sektor kehutanan dan agribisnis mencakup melemahkan AMDAL dan meniadakan perizinan lingkungan. Rencana amandemen lainnya juga berpotensi merampas hak Masyarakat Adat dan lokal untuk bersuara tentang proyek yang berdampak bagi mereka, menghapus gugatan pidana bagi perusahaan yang melanggar regulasi terkait lingkungan, dan mengatur ulang penetapan kawasan hutan untuk melegalkan perkebunan yang saat ini berstatus ilegal⁶⁸. Jika semua ini diloloskan DPR, maka regulasi yang dilemahkan ini akan secara signifikan meningkatkan risiko merek dan bank yang mendanai atau memasok komoditas dari Indonesia yang berisiko terhadap hutan. Dengan demikian penting sekali mereka memberlakukan kebijakan NDPE yang kuat untuk memitigasi risiko ini.

Tahun 2020, dan beberapa dekade mendatang merupakan titik balik yang kritis bagi nasib hutan hujan dan keanekaragaman hayati Indonesia, serta bagi perjuangan hak atas tanah untuk Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Sangat krusial untuk merek dan bank mempercepat adopsi dan implementasi kebijakan NDPE serta mendukung upaya-upaya untuk memastikan solusi yang saling menguntungkan yang dapat menjamin kesejahteraan bangsa dan perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, serta praktik pengelolaan tanah tradisional masyarakat Adat dan masyarakat lokal.





Tahun **2020**, dan dekade mendatang, **akan menjadi titik balik penting** bagi nasib hutan hujan Indonesia, keanekaragaman hayati dan perjuangan untuk hak-hak tanah bagi penduduk asli dan komunitas lokalnya selama krisis keanekaragaman hayati global.

Kopi yang tumbuh dibawah kanopi. Kawasan Ekosistem Leuser, Sumatra, Indonesia; Harimau Sumatra. FOTO: Paul Hilton / RAN

MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH

Solusi Berbasis Hak untuk Deforestasi dan Krisis Iklim

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, banyak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang tidak memegang hak legal atas tanah yang telah mereka miliki secara tradisional selama berbagai generasi. Bahkan pada daerah di mana sebagian hak Masyarakat Adat dan lokal atas tanahnya telah diakui, undang-undang dan regulasi jarang berlaku sejalan dengan norma HAM internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Dalam berbagai kasus, masyarakat Adat dan lokal tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak legal hingga perusahaan tiba-tiba mengambil akses atas tanah masyarakat, disusul kemudian dengan datangnya alat berat untuk menggusur kebun atau kampung masyarakat. Saat masyarakat menyadari hak tradisionalnya terancam, perjuangan hak tersebut dapat memakan waktu, sumber daya finansial dan legal yang tidak sedikit, yang tidak dimiliki masyarakat. Selama proses ini masyarakat mungkin akan berhadapan dengan pemaksaan, manipulasi, dan kekerasan dari perusahaan, yang akan memecah belah masyarakat dan membuat mereka menyerahkan tanahnya dengan kesepakatan tidak adil karena tidak adanya pilihan lain.

Masyarakat Adat dan lokal memiliki hubungan turun temurun dengan tanahnya yang telah membekali mereka dengan pengetahuan dan komitmen budaya mendalam untuk melindungi tempat tinggalnya. Banyak Masyarakat Adat dan lokal memiliki pandangan global yang tidak memisahkan manusia dari alam, bahkan mendorong etos interkoneksi dengan alam yang tertanam dalam bahasa, kepercayaan spiritual, dan praktik budayanya⁶⁹. Hal ini kerap membuat Masyarakat Adat dan lokal berada di garda depan gerakan perlindungan alam. Terjaminnya hak atas tanah memberikan Masyarakat Adat dan lokal kepastian bahwa mereka dapat mengelola lahannya dengan cara yang menguntungkan ekosistem hutan, mata pencaharian masyarakat, dan generasi masa depan, berikut kepastian akan manfaat dari investasi jangka panjangnya. Penjaminan hak atas tanah akan mendukung Masyarakat Adat dan lokal dalam bertahan melawan pengacau yang memasuki wilayahnya, seperti pembalok ilegal atau perusahaan oportunistik, yang diberdayakan oleh korupsi. Akan tetapi tanpa hak legal atas tanah, Masyarakat Adat dan lokal sering diabaikan pemerintah dan tidak memiliki opsi legal lain dalam melawan ekspansi perusahaan yang masuk dalam wilayah adatnya. Dengan menghormati

Masyarakat Batak di Danau Toba telah berjuang untuk mengamankan hak tanah mereka dari perusahaan pulp dan kertas Toba Pulp Lestari selama lebih dari 20 tahun.

FOTO: Agusriady Saputra / RAN



hak Masyarakat Adat dan lokal agar dapat memiliki dan mengelola wilayah adatnya serta menghormati hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) sebagaimana ditetapkan dalam UNDRIP, maka ekosistem hutan dapat bertahan dan sebagian besar kekerasan dan pelanggaran HAM yang dihadapi Masyarakat Adat dan lokal dapat diselesaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan target seluas 12,7 juta hektar lahan agar digunakan untuk mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang disebut perhutanan sosial. Satu juta dari luasan tersebut direncanakan akan dikembalikan menjadi milik masyarakat dari perusahaan yang saat ini ataupun dulu, mengelola lahan tersebut untuk konsesi kehutanan atau perkebunan industrial⁷⁰. Program-program ini menunjukkan kemajuan penting dalam gerakan pengakuan hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, akan tetapi masih banyak kemajuan yang perlu dicapai untuk menerapkan reformasi ini hingga membuat masyarakat yakin bahwa kepentingan korporat tidak akan mengurangi efektivitas upaya yang dilakukan.

Kita harus mendukung upaya pemerintah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat Masyarakat Adat dan tanah-tanah hak masyarakat lokal, alih-alih menyerahkan lebih banyak lahan kepada perusahaan untuk dikelola sebagai industri kehutanan atau pertanian. Sebaliknya, merek dan bank harus mewajibkan pemasok, penerima investasi, atau kliennya membuktikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang, regulasi, dan penghormatan hak-hak sebagaimana dijabarkan dalam UNDRIP, termasuk PADIATAPA atas semua lahan dan wilayah dalam pengembangan perkebunan yang dikelola atau dikuasai pada tingkat grup. Perusahaan apa pun yang tidak dapat sepenuhnya menunjukkan bagaimana hak seluruh Masyarakat Adat dan lokal terdampak dihormati dalam semua operasi kehutanan atau wilayah pengembangan perkebunannya, atau menunjukkan bagaimana tindakan perbaikan dan pemulihan dampak negatif dilakukan pada pembangunan baru maupun yang sudah berjalan, harus diidentifikasi dan dikeluarkan dari rantai pasok, investasi, atau portofolio pembiayaan.



2020

TAHUN UNTUK MENEPATI JANJI PERLINDUNGAN HUTAN

Forum Barang Konsumen (CGF) dan bank-bank besar yang termasuk dalam Inisiatif Perbankan untuk Lingkungan dan Kesepakatan Komoditas Lunak telah berkomitmen untuk “memobilisasi sumber daya untuk membantu mencapai nol net deforestasi⁷¹ pada tahun 2020” pada empat rantai pasok komoditas paling berisiko terhadap hutan, yaitu kelapa sawit, pulp dan kertas, kedelai, dan ternak sapi⁷². Lebih dari 365 perusahaan telah mengadopsi kebijakannya masing-masing untuk melarang pemasok, investasi, atau klien yang mengakibatkan dampak sosial dan lingkungan, banyak juga penganut kebijakan tersebut yang mewajibkan kebijakan ‘Tanpa Deforestasi’⁷³. Bank dan investor Eropa dan AS juga semakin banyak yang mengikuti langkah ini dengan berkomitmen untuk tidak membiayai perusahaan yang bertanggung jawab atas deforestasi atau memutuskan kerja sama dengan klien yang terkait deforestasi dan pelanggaran HAM⁷⁴.

Investigasi yang dilakukan Rainforest Action Network dan LSM lainnya menunjukkan bahwa janji-janji di atas kertas ini gagal diimplementasikan ketika sangat dibutuhkan, yaitu pada wilayah dimana hutan masih utuh. Walaupun tahun 2020 adalah tenggat waktu CGF yang mereka tetapkan sendiri untuk mengatasi deforestasi namun pembalakan kayu, deforestasi untuk perkebunan, dan pembangunan jalan, masih belum dapat dihentikan. Gambar-gambar berikut diambil saat investigasi lapangan bulan Januari 2020 dan menunjukkan hutan hujan terpenting Indonesia di Kawasan Ekosistem Leuser dan Papua terus dihancurkan untuk komoditas berisiko terhadap hutan, seperti kelapa sawit dan kayu.



Keterangan gambar: Deforestasi skala besar untuk kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel di bagian selatan Provinsi Papua.

Sektor komoditas Indonesia yang berisiko terhadap hutan didominasi oleh konglomerat kehutanan atau agribisnis yang dikuasai oleh perorangan maupun keluarga⁷⁵. Berbagai laporan menunjukkan bahwa walaupun banyak perusahaan kehutanan dan agribisnis ini memiliki komitmen publik mengenai keberlanjutan --termasuk acuan global untuk produksi minyak kelapa sawit bertanggung jawab yaitu Tanpa Deforestasi, Tanpa Pembangunan di Lahan Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE)-- namun pemilik usaha terus menerima keuntungan finansial melalui praktik eksploitatif dan destruktif, dengan menyembunyikan kepemilikan dan kontrol atas pemasok pihak ketiga atau 'perusahaan bayangan'⁷⁶. Perusahaan lain mungkin telah menanggapi deforestasi di bank tahannya sendiri, tapi belum dapat menegakkan moratorium di tingkat pemasok pihak ketiga yang terus terpapar terhadap perusakan hutan hujan dan lahan gambut⁷⁷. Banyak diantara raksasa korporasi terus mensuplai merek-merek besar atau mendapatkan pembiayaan dari bank, terlepas dari kegagalan perusahaan tersebut untuk sepenuhnya mengimplementasikan komitmen NDPE di seluruh operasional, rantai pasok, dan investasi mereka.

CGF, Inisiatif Perbankan untuk Lingkungan, dan perusahaan lain yang telah mengumumkan komitmen NDPE, gagal mengakhiri deforestasi terkait ekspansi komoditas berisiko terhadap hutan. Tahun 2020 harus menjadi tahun di mana komitmen-komitmen ini ditegaskan kembali dan pengambilan tindakan dipercepat guna menerapkan komitmen tersebut di garda depan ekspansi kehutanan dan pertanian industrial. Untuk menerapkan standar NDPE secara efektif, pelaku rantai pasok dan keuangan harus mematuhi persyaratan NDPE di seluruh operasi masing-masing grup perusahaan, termasuk entitas di mana produsen NDPE memiliki kuasa finansial, manajerial, dan operasional.



Pembukaan jalan dan pembalakan baru di hutan hujan dataran rendah terus terjadi di Kawasan Ekosistem Leuser. Januari 2020.

MENGUAK MEREK DAN BANK YANG MEMICU DEFORESTASI

Merek dan bank multinasional ini bersama-sama mewakili beberapa perusahaan paling berpengaruh yang **memicu kerusakan hutan hujan dan pelanggaran HAM.**



Mondelēz
International

NISSIN

Nestlé

Unilever

P&G

COLGATE-PALMOLIVE

FERRERO

MARS



PEPSICO

kao

MUFG

DBSBANK



ABN-AMRO

CHASE



CIMB BANK

ICBC



BNI

Pabrik pemrosesan minyak kelapa sawit. Sumatra, Indonesia.
FOTO: Paul Hilton / RAN

Bersama-sama, merek dan bank multinasional yang disebutkan disini menjadi perusahaan utama yang mendorong perusahaan hutan hujan dan pelanggaran HAM. Merek-merek ini terhubung melalui pemasokan komoditas berisiko terhadap hutan, sedangkan bank menyediakan investasi dan jasa keuangan kepada perusahaan kehutanan dan agribisnis yang mendorong kerusakan. Tabel berikut menampilkan

TABEL 1: Ringkasan keterkaitan merek dan bank terhadap komoditas berisiko terhadap hutan dan respon kebijakannya



Nama Perusahaan	Lokasi Kantor Pusat	Pendapatan* (USD Miliaran)	Keterkaitan dengan Komoditas
Colgate-Palmolive	United States	\$15.69	
Ferrero	Luxembourg	\$11.56	
Kao	Japan	\$13.63	
Mars	United States	\$37.00	
Mondelēz	United States	\$25.87	
Nestlé	Switzerland	\$94.43	
Nissin Foods	Japan	\$4.09	
PepsiCo	United States	\$67.16	
Procter & Gamble	United States	\$67.68	
Unilever	Netherlands / UK	\$56.16	



ABN Amro	Netherlands	\$13.64	
BNI	Indonesia	\$5.23	
CIMB	Malaysia	\$6.48	
DBS	Singapore	\$15.10	
JPMorgan Chase	United States	\$142.42	
ICBC	China	\$159.71	
MUFG	Japan	\$57.17	

Metodologi yang digunakan untuk asesmen ini tersedia atas permintaan.

* Pendapatan dari tahun 2018 atau 2019

pengaruh global masing-masing merek dan bank; sejauh mana mereka terhubung dengan pemasok, investasi, dan pembiayaan rantai pasok komoditas berisiko terhadap hutan; risiko keterkaitan dengan deforestasi dan pelanggaran HAM; dan bagaimana mereka merespon kekhawatiran global yang meningkat melalui publikasi kebijakan NDPE dan pengungkapan jejak hutannya.



Kelapa Sawit



Kedelai



Kayu



Pulp & Kertas



Daging Sapi



Lainnya

Risiko Deforestasi dan Pelanggaran HAM

(Tinggi, Medium, Rendah)

Kebijakan NDPE

(Y / T)

Cakupan Penuh NDPE

(Y / T / Sebagian)

Pengungkapan Jejak Hutan

(Y / T / Sebagian)

Tinggi

Ya

Sebagian

Tidak

Tinggi

Ya

Tidak

Tidak

Tinggi

Ya

Sebagian

Tidak

Tinggi

Ya

Sebagian

Tidak

Tinggi

Ya

Tidak

Tidak

Tinggi

Ya

Sebagian

Tidak

Tinggi

Tidak

Tidak Berlaku

Tidak

Tinggi

Ya

Sebagian

Tidak

Tinggi

Ya

Tidak

Tidak

Tinggi

Ya

Sebagian

Tidak

Tinggi

Ya

Sebagian

Tidak

Tinggi

Tidak

Tidak Berlaku

Tidak

Tinggi

Tidak

Tidak Berlaku

Tidak

Tinggi

Ya

Tidak

Tidak

Tinggi

Tidak

Tidak Berlaku

Tidak

Tinggi

Tidak

Tidak Berlaku

Tidak

Tinggi

Tidak

Tidak Berlaku

Tidak

Rainforest Action Network telah menghubungi perusahaan merek dan bank yang terdaftar diatas mengenai penyebutan perusahaan di dalam laporan ini. Sebagian respon telah diterima, atau pertemuan dilakukan dengan penerima. Asesmen ini diperbarui untuk mencerminkan data terbaru yang dipublikasikan. Ringkasan dari respon yang diterima sebelum dan setelah publikasi dapat dilihat di www.ran.org/keepforestsstanding_responses

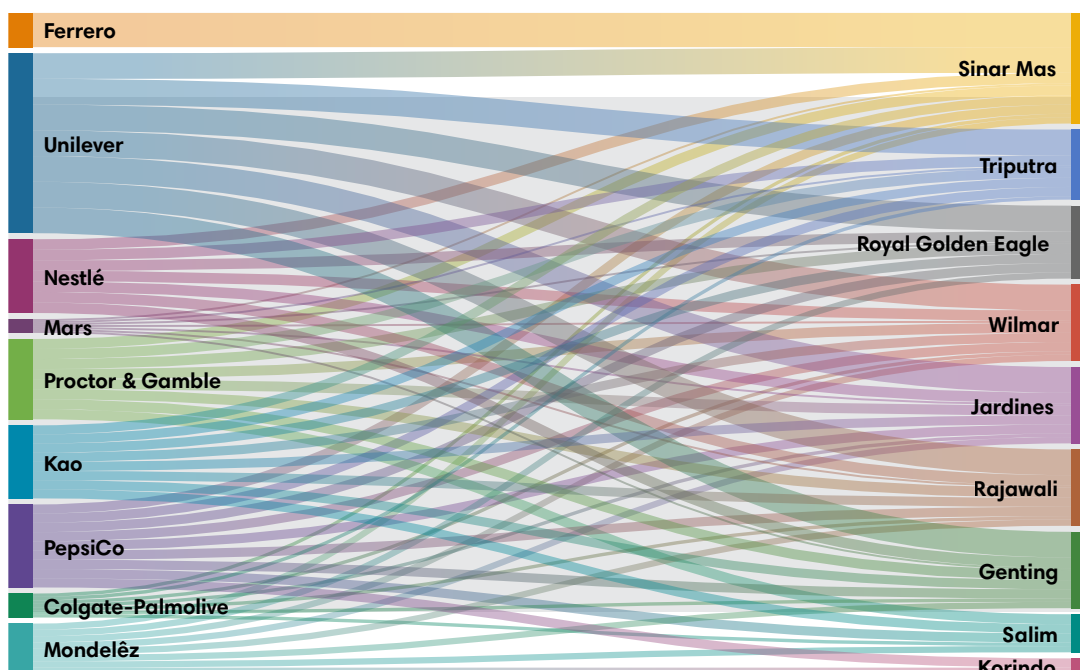
MEREK YANG MEMICU DEFORESTASI DAN PELANGGARAN HAK

Rantai pasok yang mensuplai merek multinasional, khususnya pada sektor barang konsumen dengan perputaran cepat (FMCG) memiliki dampak besar dan langsung terhadap hutan. Perusahaan FMCG menciptakan barang-barang tidak tahan lama seperti makanan dalam kemasan, minuman, perlengkapan mandi, dan barang konsumsi lainnya yang dijual cepat dengan harga relatif murah. Permintaan akan produk-produk murah ini mendorong deforestasi dan merugikan Masyarakat Adat dan lokal, seringkali bertentangan dengan kebijakan lingkungan dan HAM perusahaan itu sendiri, serta melanggar peraturan perundangan daerah dan nasional, serta norma-norma internasional.

Rainforest Action Network menekankan peran sepuluh merek berikut: Colgate-Palmolive, Ferrero, Kao, Mars, Mondelêz, Nestlé, Nissin Foods, PepsiCo, Procter & Gamble, dan Unilever. Dalam satu tahun, perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh pendapatan lebih dari USD 390 miliar⁷⁸. Bersama-sama mereka memasok lebih dari 3.500.000 metrik ton minyak kelapa sawit pada tahun 2018 (satu-satunya komoditas yang sepenuhnya dilaporkan)⁷⁹. Sementara itu, dampak kolektif terhadap hutan, Masyarakat Adat dan masyarakat lokal dari kegiatan memasok pulp dan kertas, ternak sapi, kedelai, kakao, dan komoditas berisiko terhadap hutan lainnya masih belum terbuka, karena tidak ada yang secara transparan mengungkapkan keseluruhan jejak hutannya. Dari merek-merek ini, hanya Nestlé dan Mars yang mengungkapkan daftar pemasoknya dalam semua komoditas berisiko terhadap hutan, dan tidak ada merek yang telah memverifikasi secara kredibel bahwa kegiatan memasok yang mereka lakukan bebas dari deforestasi, ekspansi di lahan gambut, atau pelanggaran HAM⁸⁰. Bahkan dari sedikit data yang tersedia, terlihat bahwa merek-merek ini terlibat dalam perusakan jutaan hektar hutan hujan tropis dan lahan gambut di Indonesia dengan memasok dari, atau melalui investasi atau kesepakatan bisnisnya dengan raksasa kehutanan dan agribisnis.

Diagram 1 di bawah ini mengidentifikasi hubungan spesifik antara sembilan merek yang telah mengungkapkan daftar pabrik kelapa sawit (PKS)-nya, yaitu Colgate-Palmolive, Ferrero, Kao, Mars, Mondelêz, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, dan Unilever, serta 10 perusahaan kehutanan dan agribisnis terkemuka yang terlibat dalam produksi minyak kelapa sawit, pulp dan kertas, kayu, dan komoditas berisiko terhadap hutan lainnya di Indonesia⁸¹. Grup Best Industry, Genting, Grup Jardines, Korindo, Rajawali Corpora, Royal Golden Eagle, Salim Group, Sinar Mas Group, Grup Triputra, dan Wilmar Internasional adalah sepuluh dari grup perusahaan paling berpengaruh di Indonesia dan bertanggung jawab atas pembalakan dan deforestasi hutan hujan dan lahan gambut yang luas mulai dari pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke pulau-pulau di bagian timur seperti Maluku, Papua Barat, dan Papua.

DIAGRAM 1: Gambaran Hubungan Perusahaan Merek Berpengaruh terhadap Perusahaan Minyak Kelapa sawit yang Berisiko terhadap Hutan (sumber: daftar PKS yang diungkapkan perusahaan sendiri).



* Walaupun data dari daftar PKS Ferrero yang dipublikasikan sudah termasuk disini, hal ini tidak mencerminkan pemasokan minyak kelapa sawit dalam aliran produknya yang baru-baru ini diakuisisi di Amerika Serikat, dan dengan demikian keterkaitan yang disebutkan kemungkinan lebih rendah daripada yang sebenarnya⁸³.

** Data Bea Cukai AS dari akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa Grup BEST Industry diketahui sebagai salah satu pemasok ke pasar AS. Merek ini berisiko memasok dari BEST di AS dan pasar lainnya di mana saat ini sumber NDPE yang dapat ditelusuri dan diverifikasi secara independen tidak tersedia⁸⁴.

Berbeda dari sembilan perusahaan di atas, Nissin Foods belum mengambil langkah kritis untuk mengadopsi kebijakan NDPE atau mengungkapkan daftar pabrik minyak kelapa sawit maupun pemasok komoditas berisiko lainnya terhadap hutan. Nissin Foods kemungkinan tinggi terhubung dengan deforestasi dan pelanggaran HAM, karena komoditas berisiko terhadap hutan dalam volume tinggi yang diimpor ke Jepang dan negara lain di mana produk ini dimanufaktur, berasal dari Indonesia. Importir minyak kelapa sawit besar ke Jepang adalah Grup Sinar Mas, Royal Golden Eagle, dan Wilmar, sedangkan Grup Sinar Mas dan Royal Golden Eagle juga mengimpor pulp dan kertas dalam volume yang signifikan. Alih-alih membuat kebijakan yang tegas untuk menghentikan deforestasi dan pelanggaran HAM atas komoditas berisiko terhadap hutan yang dipasok, Nissin Foods terus bergantung pada skema sertifikasi yang kurang memadai seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Selama puluhan tahun, sejak dibuatnya komitmen masing-masing dan kolektif perusahaan untuk mengakhiri deforestasi komoditas minyak kelapa sawit, pulp dan kertas, kedelai, dan ternak sapi, merek-merek ini gagal: menegakkan moratorium deforestasi; menetapkan sistem monitoring dan respon terhadap deforestasi dan lahan gambut yang transparan dan kuat; memverifikasi bahwa pemasok memiliki bukti hak legal atas tanah yang mereka kelola dan telah menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan lokal yang menolak pembalakan dan ekspansi komoditas pertanian di tanah mereka; atau mencapai ketertelusuran hingga perkebunan atau kebun yang memproduksi komoditas yang dipasok⁸². Alih-alih mencapai implementasi kebijakan NDPE-nya, banyak merek bergantung pada suplai komoditas melalui sistem sertifikasi tidak terpercaya yang mencampur bahan yang dipasok secara kontroversial dengan bahan bersertifikasi untuk menekan harga sambil memberikan peluang bagi merek-merek untuk mengklaim ke konsumen mereka (secara menyesatkan menurut kami) bahwa produk mereka dibuat menggunakan bahan baku yang “berkelanjutan”.

Alasan perusahaan merek melakukan perubahan di tahun 2020 sama kuatnya dengan alasan pada tahun 2010 saat sekumpulan perusahaan dan ratusan lainnya dalam CGF berikrar memberantas deforestasi di rantai pasok global. Merek-merek tersebut harus segera mengadopsi dan/atau mempercepat implementasi kebijakan NDPE yang kuat, mengungkapkan jejak hutan dan dampak terhadap Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang terdampak oleh pembalakan atau ekspansi perkebunan industrial, dan memutuskan kerja sama dengan pemasok atau penerima investasi atau mitra usaha gabungan yang gagal mematuhi kebijakan tersebut sepenuhnya atau menerapkan tindakan perbaikan untuk memulihkan dampak negatif. Merek-merek juga berperan dalam mengadvokasi undang-undang dan regulasi pendukung di negara produsen dan konsumen agar menanggapi akar penyebab deforestasi, pembukaan lahan gambut, dan dampak lingkungan dan sosial yang buruk.



BANK YANG MEMICU DEFORESTASI DAN PELANGGARAN HAK

Bank memiliki peran kuat dan unik dalam menentukan masa depan hutan dunia. Dari ruang rapat dalam gedung pencakar langit di simpul finansial dunia, para bankir menandatangani kesepakatan bernilai jutaan dolar yang memungkinkan perusahaan membuka hutan dan merugikan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Pembiayaan sering kali disetujui walaupun bertentangan dengan komitmen lingkungan dan HAM bank itu sendiri dan tetap mengalirkan dana meskipun klien merekadiketahui beroperasi dengan melanggar undang-undang dan peraturan daerah dan nasional.

Pembiayaan bank yang memicu deforestasi serta rantai pasok global yang mendorong permintaan ini diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar per tahun. Penelitian yang dilakukan oleh ForestsAndFinance.org menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir ini saja, lebih dari 48 miliar USD pinjaman dan penjaminan diberikan pada operasi sektor berisiko terhadap hutan yang terdiri dari 100 perusahaan yang terkait langsung dengan deforestasi di Asia Tenggara. Jumlah ini menggambarkan skala kekuatan ekonomi yang melanggengkan deforestasi, krisis iklim dan HAM.

Sebagian besar dana ini yang mempengaruhi Asia Tenggara berasal dari bank-bank dengan kantor pusat di Cina, Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Akan tetapi bank di Eropa dan Amerika Serikat juga turut memicu persoalan ini. Pada tahun 2020 yang kritis ini, Rainforest Action Network menekankan peran dari tujuh bank berpengaruh, yaitu satu bank dari masing-masing simpul finansial tersebut. Walaupun bank-bank ini mewakili spektrum dalam hal komitmen yang dinyatakan untuk menghentikan pembiayaan deforestasi dan pelanggaran hak, namun mereka sama-sama gagal menerapkan dan mempraktikkan komitmennya. Ketujuh bank ini, serta sektor perbankan secara umum, gagal melakukan pengecekan yang tepat atau memilih mengabaikan dan menyembunyikan dampak nyata pembiayaannya terhadap hutan, iklim, serta Masyarakat Adat dan masyarakat lokal.



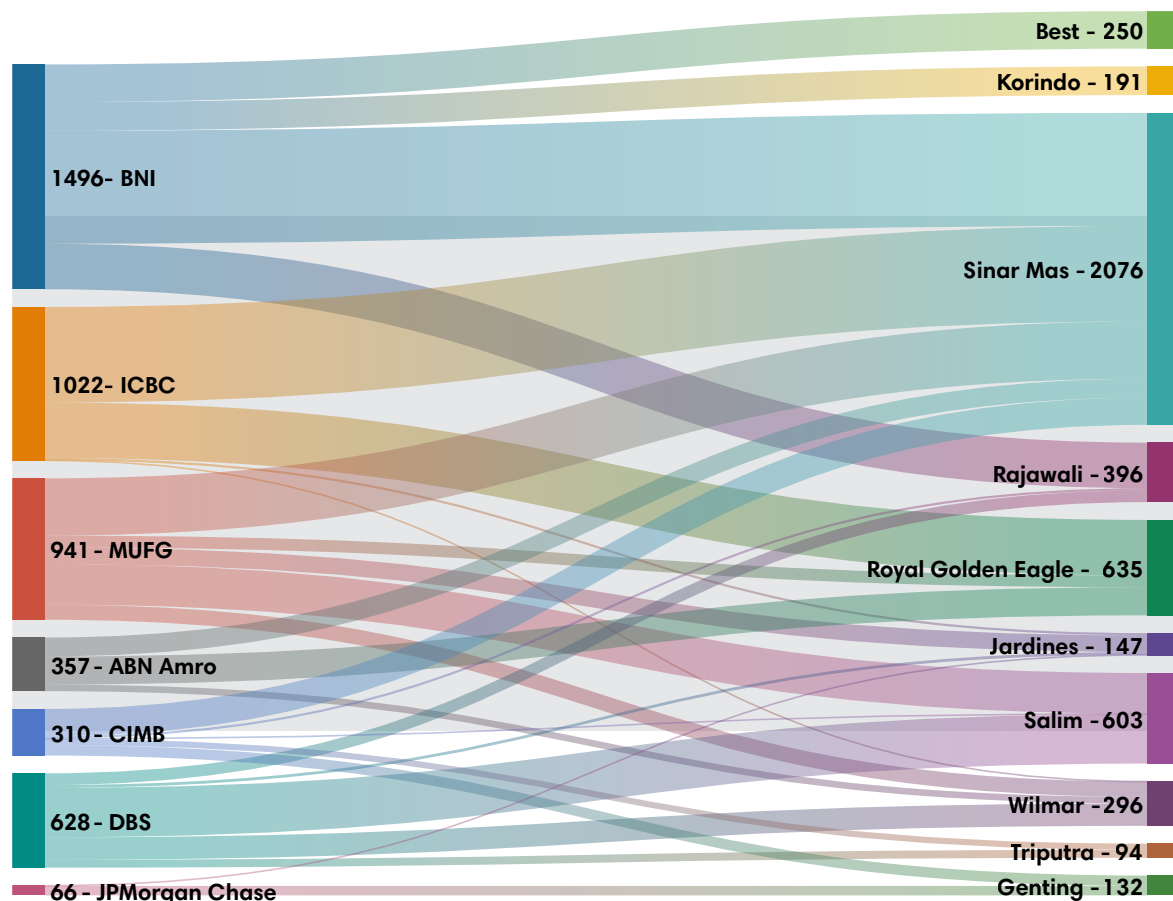
Diagram 2 di bawah ini mengidentifikasi pembiayaan yang dilakukan baru-baru ini antara ketujuh bank tersebut dan operasi hutan dari sepuluh perusahaan kehutanan dan agribisnis yang disebutkan dalam laporan ini, yang secara langsung terkait dalam produksi minyak kelapa sawit, pulp dan kertas, kayu, dan komoditas berisiko terhadap hutan lainnya di Indonesia. Melalui dukungannya untuk grup perusahaan yang terkenal buruk ini, kelompok bank tersebut terlibat dalam perusakan hutan hujan dan lahan gambut tropis bernilai penting, serta terlibat dalam perampasan tanah dan pelanggaran HAM lainnya.

Bank menyediakan pembiayaan untuk perusahaan kehutanan dan agribisnis untuk melakukan akuisisi dan merger, memperluas operasi ke hutan yang masih utuh, membangun fasilitas pengolahan seperti PKS atau pabrik kayu pulp, refinancing utang, dan untuk modal kerja secara umum. **Sebagai pembuat keputusan mengenai perusahaan yang akan menerima atau tidak menerima pembiayaan, bank memiliki kemampuan dan tanggung jawab unik untuk menjaga tegakan hutan.**

Bank memiliki dua pilihan terkait klien dari sektor komoditas berisiko terhadap hutan. Satu: mereka dapat memberlakukan persyaratan pinjaman di mana klien harus memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat, konsisten dengan kebijakan NDPE; atau dua: mereka bisa terus mendapatkan keuntungan dari perusakan hutan, pelanggaran HAM, dan risiko finansial atau risiko reputasi. Sayangnya, sebagian besar sektor keuangan global mengikuti opsi kedua, hal ini harus berubah.

Semua bank harus segera mengadopsi dan/atau mempercepat implementasi kebijakan NDPE yang kuat, mengetahui dan mengungkapkan jejak hutan dan dampak pembiayaan mereka terhadap Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang terdampak oleh pembalakan atau ekspansi perkebunan industrial, dan memutuskan kerja sama dengan klien grup perusahaan yang gagal mematuhi kebijakan tersebut sepenuhnya atau menerapkan tindakan korektif untuk memulihkan dampak negatif. Regulator finansial juga berperan penting dalam menuntut transparansi dalam sistem finansial. Mereka harus segera mengadopsi atau memperkuat regulasi yang mendorong bank mengungkapkan dan menanggapi dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan melalui penyediaan jasa keuangan.

DIAGRAM 2: Pinjaman dan Penjaminan dari Bank Berpengaruh untuk Perusahaan Berisiko terhadap Hutan di Indonesia (dalam juta USD, 2015–Agustus 2019. Sumber: forestsandfinance.org).





MEMPERKENALKAN BEBERAPA BANK PALING BERPENGARUH YANG MUNGKIN BELUM ANDA KENAL



ABN-AMRO

- » Bank milik pemerintah Belanda dan pemberi pinjaman utama perusahaan berisiko terhadap hutan yang beroperasi di Asia Tenggara
- » Kebijakan kepatuhan NDPE dan merupakan anggota pendiri Prinsip PBB untuk Perbankan yang Bertanggung Jawab
- » Terus mendanai perusahaan kelapa sawit, pulp dan kertas yang secara operasional melanggar kebijakan NDPE-nya



- » Bank milik pemerintah Indonesia dan pemberi pinjaman besar kepada perusahaan berisiko terhadap hutan yang beroperasi di seluruh Indonesia
- » Baru-baru ini mengadopsi prinsip pembiayaan berkelanjutan, termasuk kebijakan kehutanan dan agribisnis dasar
- » Terus membiayai berbagai perusahaan yang terlibat operasi ilegal, melakukan deforestasi skala luas, pelanggaran hak, dan tata kelola finansial yang buruk



CIMB BANK

- » Bank terkait pemerintah Malaysia yang beroperasi di seluruh wilayah ASEAN, pemberi pinjaman besar bagi perusahaan berisiko terhadap hutan
- » Memiliki komitmen lingkungan dan sosial dasar dan merupakan anggota pendiri Prinsip PBB untuk Perbankan yang Bertanggung Jawab
- » Terus membiayai perusahaan berisiko terhadap hutan yang secara operasional melanggar kebijakan NDPE-nya, termasuk perusahaan yang terlibat dalam kebakaran dan asap yang berulang kali terjadi di Asia Tenggara



DBS BANK

- » Bank terkait pemerintah Singapura dan bank terbesar di Asia Tenggara berdasarkan aset total
- » Telah mengadopsi kebijakan NDPE parsial (mencakup pembiayaan hingga klien di sektor minyak kelapa sawit)
- » Terus membiayai perusahaan berisiko terhadap hutan yang secara operasional melanggar kebijakan NDPE-nya, termasuk perusahaan yang terlibat dalam kebakaran dan asap yang berulang kali terjadi di Asia Tenggara

ICBC



- » Bank milik pemerintah Tiongkok dan bank terbesar di dunia berdasarkan aset total, salah satu pemberi biaya besar untuk sektor pulp dan kertas
- » Tunduk pada Pedoman Kredit Hijau Tiongkok dan merupakan anggota pendiri Prinsip PBB untuk Perbankan yang Bertanggung Jawab
- » Terus membiayai perusahaan yang terlibat dalam deforestasi, pelanggaran hak, dan tata kelola finansial yang buruk

CHASE



- » Bank terbesar di Amerika Serikat berdasarkan aset total, dengan investasi besar di rantai pasok komoditas global yang berisiko terhadap hutan
- » Satu-satunya Bank Wall Street yang menandatangani Kesepakatan Komoditas Lunak, berkomitmen memastikan operasi klien menyebabkan nol net deforestasi
- » Terus membiayai perusahaan yang terlibat dalam produksi dan perdagangan komoditas yang mendorong terjadinya deforestasi dan pelanggaran hak



MUFG

- » Bank terbesar di Jepang berdasarkan aset total dan perusahaan induk dari Bank Union di California, dengan pembiayaan yang cukup besar untuk perusahaan berisiko terhadap hutan di Asia Tenggara
- » Penandatanganan Prinsip PBB untuk Perbankan yang Bertanggung Jawab dan baru-baru ini mengadopsi kebijakan sektor hutan, walaupun tidak mematuhi NDPE
- » Terus membiayai perusahaan yang terlibat dalam ilegalitas, deforestasi, pelanggaran hak, dan tata kelola finansial yang buruk, yang merupakan pelanggaran kebijakannya

MENGUAK PERUSAHAAN RAKSASA KEHUTANAN DAN AGRIBISNIS

Di Garda Depan Deforestasi dan Pelanggaran Hak

Industri kelapa sawit, pulp dan kertas Indonesia didominasi oleh segelintir konglomerat, dan dimiliki dan dikuasai taipan atau kelompok keluarga Indonesia yang berkuasa, serta investor asing dari Singapura, Skotlandia, dan Korea Selatan⁸⁵. Kelompok konglomerat ini adalah produsen, pemroses, dan pedagang komoditas yang berisiko terhadap hutan, yaitu perusahaan yang memasok merek-merek dan didanai oleh bank. Bersama-sama mereka memiliki sejarah perusakan lingkungan dan konflik dengan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal akibat ekspansi pembalakan industrial dan pembangunan pertanian di seluruh Indonesia. Keputusan bisnis konglomerat ini akan berdampak luas terhadap masa depan hutan Indonesia serta terhadap persoalan lain seperti hak Masyarakat Adat, lokal, dan hak buruh. Mereka berencana memperluas ke pasar baru, sebagaimana digambarkan di bawah ini, hingga mengancam peningkatan tekanan pada hutan hujan tropis terakhir di Indonesia dan juga di wilayah hutan tropis lainnya.

Laporan ini menyorot sepuluh dari grup perusahaan terbesar yang menerima manfaat dari maraknya pembalakan dan deforestasi terhadap hutan hujan Indonesia untuk kayu, kelapa sawit, dan pulp dan kertas, yaitu: Grup Best Industry, Grup Genting, Grup Jardine Matheson, Grup Korindo, Rajawali Corpora, Royal Golden Eagle, Grup Salim, Grup Sinar Mas, Grup Triputra, dan Wilmar Internasional. Masing-masing grup ini menguasai lebih dari 100.000 hektar perkebunan kelapa sawit, atau untuk raksasa pulp dan kertas Grup Sinar Mas dan Royal Golden Eagle, jutaan hektar HTI⁸⁶. Lebih dari lima juta hektar lahan di Indonesia dikelola oleh sekumpulan raksasa kehutanan dan agribisnis ini, termasuk tegakan hutan hujan dan lahan gambut yang 'belum dibangun' dalam wilayah yang dialokasi oleh pemerintah atau dicadangkan sebagai kawasan konservasi. Secara kolektif, kelompok perusahaan ini memiliki jejak hutan yang luar biasa besar.

Secara kolektif, grup ini mengolah lebih dari 30 juta ton produk minyak kelapa sawit murni hasil sulingan setiap tahunnya⁸⁷. Wilmar International sendiri menguasai lebih dari 45% pasar minyak kelapa sawit global dan memiliki rantai pasok yang mencakup 14,8 juta hektar perkebunan⁸⁸. Wilmar, bersama Grup Sinar Mas, Royal Golden Eagle, dan Grup Best Industry, merupakan lima pengolah minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia dan menguasai 66% kapasitas penyulingan Indonesia⁸⁹. Wilmar, Sinar Mas, Royal Golden Eagle, dan Grup Best Industry juga merupakan empat pengolah terbesar yang sudah disetujui untuk mengolah bahan bakar nabati (biofuel) dari minyak kelapa sawit, yang merupakan pasar yang sedang berkembang. Mereka juga memanufaktur produk konsumen utama yang mengandung minyak kelapa sawit untuk konsumsi domestik di Indonesia, serta pasar besar lain seperti India, Tiongkok, dan Afrika. Sebagian besar raksasa minyak kelapa sawit ini memiliki rencana pertumbuhan dan sedang membangun pabrik pengolahan baru di Indonesia dan luar negeri dimana pasar minyak kelapa sawit sedang berkembang, termasuk di India, Tiongkok, dan Afrika Tengah. Beberapa perusahaan ini terus melakukan ekspansi perkebunan dan fasilitas pengolahan setengah-jadi (mid-stream) di wilayah hutan baru di Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Brazil, di mana hutan hujan tropis Lembah Kongo dan hutan hujan Amazon berada.

Sepuluh raksasa kehutanan dan agribisnis ini mengoperasikan jaringan pemasok minyak kelapa sawit yang luas. Di Indonesia saja terdapat lebih dari 900 PKS pemasok⁹⁰, 75 pabrik penyulingan minyak kelapa sawit beroperasi 24 jam sehari dari Sumatera hingga Sulawesi, masing-masing dengan 50-100 PKS pemasok dan menghasilkan sekitar 45 juta ton minyak kelapa sawit per tahun, yang kemudian dikirim ke seluruh dunia melalui jaringan 135 pabrik penyulingan di 16 negara⁹¹. Ribuan perkebunan milik perusahaan juga memasok jutaan ton kelapa sawit, selain kebun milik masyarakat dan petani kelapa sawit.

Sektor pulp dan kertas Indonesia didominasi oleh Grup Sinar Mas dan grup Royal Golden Eagle. Keduanya menguasai lebih dari empat juta hektar lahan melalui divisi kehutanannya masing-masing yaitu Asia Pulp and Paper Group (APP) dan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). Dengan pemasok pihak ketiganya, mereka menguasai 95% pasar pulp Indonesia, melalui operasi pabrik pulp dan kertas milik mereka sendiri serta pemasoknya yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua⁹². Hal ini menunjukkan kapasitas produksi total sekitar 10 juta ton pulp pada tahun 2018⁹³. Divisi kelapa sawit Sinar Mas yaitu Golden Agri Resources, dan produsen dan pengolah minyak kelapa sawit Royal Golden Eagle yaitu Asian Agri serta perusahaan pengolah dan pedagangannya yaitu APICAL, juga memiliki saham cukup besar di pasar minyak kelapa sawit Indonesia dan global. ⁹⁴Tabel berikut ini merangkum pengaruh, penerima manfaat, dan keterkaitan yang masih berlanjut dari masing-masing grup perusahaan terhadap deforestasi dan pelanggaran HAM dalam operasional dan/atau rantai pasok komoditasnya yang berisiko terhadap hutan.

Tabel berikut ini merangkum pengaruh, penerima manfaat, dan keterkaitan yang masih berlanjut dari masing-masing grup perusahaan terhadap deforestasi dan pelanggaran HAM dalam operasional dan/atau rantai pasok komoditasnya yang berisiko terhadap hutan.

TABEL 2: Pengaruh dan Dampak dari Sepuluh Perusahaan Raksasa Kehutanan dan Agribisnis

Nama Grup Korporas	Lokasi Kantor Pusat	Penerima Manfaat	Produsen Komoditas Berisiko terhadap Hutan	Bank Tanah terkait Komoditas	
				(Hektar)	
Best Industry Group	Indonesia	Mr. Rendra and Winarno Tjajadi			~200.000
Genting Group	Malaysia	Mr. Tan Sri Lim Kok Thay			247.400
Jardine Matheson Group	London, registered in Bermuda	Keswick Family			285.025
Korindo Group	Indonesia	Mr. Eun-Ho-Seung	  		549.000
Rajawali Corpora	Indonesia	Mr. Peter Sondakh			343.842
Royal Golden Eagle	Singapore	Mr. Sukanto Tanoto	 		1,16 juta
Salim Group	Hong Kong, Singapore and Indonesia	Mr. Anthony Salim	  		550.000
Sinar Mas Group	Singapore and Indonesia	Eka Tjipta Widjaja's family	 		302.000
Triputra Group	Indonesia	Mr. Theodore Permadi Rachmat & Arinit Subianto			3,1 juta
Wilmar International	Singapore	Mr. Robert Kuok & Khoon Hong Kuok			> 415.208



Kelapa Sawit



Kedelai



Kayu



Pulp & Kertas



Daging Sapi



Lainnya

Pengolah Komoditas Berisiko terhadap Hutan*

Deforestasi pada Bank Tanah*

Pelanggaran HAM pada Operasional Perusahaan*

Terkait dengan Deforestasi dan Pelanggaran HAM pada Rantai Pasok Pihak Ketiga dan Investasi

Pengungkapan Jejak Hutan

(Tinggi, Medium, Rendah)

(Tinggi, Medium, Rendah)

(Tinggi, Medium, Rendah)

(Y / T / Sebagian)



Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tidak



Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tidak



Medium

Tinggi

Tinggi

Tidak



Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tidak



Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tidak



Medium

Tinggi

Tinggi

Medium



Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tidak



Rendah

Tinggi

Tinggi

Medium



Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tidak



Rendah/Medium

Tinggi

Tinggi

Tidak

* Dikendalikan oleh Grup Perusahaan

Metodologi yang digunakan untuk asesmen ini tersedia atas permintaan.

Rainforest Action Network telah menghubungi perusahaan merek dan bank yang terdaftar diatas mengenai penyebutan perusahaan di dalam laporan ini. Sebagian respon telah diterima, atau pertemuan dilakukan dengan penerima. Asesmen ini diperbarui untuk mencerminkan data terbaru yang dipublikasikan. Ringkasan dari respon yang diterima sebelum dan setelah publikasi dapat dilihat di www.ran.org/keepforestsstanding_responses

Royal Golden Eagle, Grup Sinar Mas, dan Wilmar International telah mengadopsi kebijakan NDPE yang melarang deforestasi, pembangunan di lahan gambut, dan pelanggaran HAM di dalam wilayah, investasi, dan rantai pasok yang mereka kuasai⁹⁵. Hingga saat ini, masing-masing grup perusahaan gagal mengungkapkan bukti yang menunjukkan bahwa operasinya dan jejak rantai pasoknya telah diverifikasi secara independen dan dinyatakan bebas deforestasi, degradasi hutan atau lahan gambut, atau pelanggaran HAM. Dengan kegagalan kolektifnya mengakhiri deforestasi dalam rantai pasok kelapa sawit dan pulp dan kertas pada tenggat waktu tahun 2020 dari mitra bisnis mereka, yaitu merek dan bank, maka jelas bahwa mereka harus meningkatkan upayanya. Mereka harus mengidentifikasi dan menghentikan pembalakan dan deforestasi hutan hujan Indonesia dan pembangunan baru apa pun di lahan gambut, menghormati hak di semua wilayah pengembangan baru, dan memberikan pemulihan bagi krisis sosial dan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan masyarakatnya sebagai hasil dari puluhan tahun pembalakan dan praktik perkebunan industrial yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini, Grup Best Industry⁹⁶, Genting⁹⁷, Rajawali Corpora⁹⁸, dan Grup Triputra⁹⁹ berada pada posisi di belakang rekan sejawatnya karena belum menerbitkan kebijakan yang sejalan dengan persyaratan NDPE yang ditetapkan oleh merek dan bank besar. Aktor-aktor nakal ini terus melakukan ekspansi, termasuk ke dalam hutan yang masih utuh di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, di mana kawasan hutan tersebut merupakan hutan hujan tropis dengan risiko paling tinggi di Indonesia dari pembalakan dan deforestasi untuk kelapa sawit dan pulp dan kertas¹⁰⁰.

Jardine Matheson¹⁰¹ dan anak perusahaan Grup Salim¹⁰² telah mengadopsi kebijakan yang mengacu pada komitmen 'No Deforestation' dan 'No Pembangunan di Lahan Gambut', namun tidak memiliki persyaratan yang mematuhi norma HAM dan hak buruh internasional, atau skema sertifikasi seperti RSPO dan Forestry Stewardship Council (FSC). IndoAgri, anak perusahaan dari Grup Salim, telah mengadopsi kebijakan yang mengklaim bahwa perusahaannya berkomitmen tidak membuka area dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi¹⁰³. Akan tetapi, kebijakan ini hanya berlaku pada IndoAgri, tidak untuk semua perusahaan terkait dengan Anthoni Salim, pemimpin Grup Salim yang dikuasai keluarganya, seperti Grup Indogunta. Grup Indogunta, yang sebelumnya dikenal dengan nama Gunta Sumba, menguasai konsesi berhutan yang terancam deforestasi di Papua dan Papua Barat¹⁰⁴.

Sebagian dari perusahaan ini mengaku menerapkan komitmen Tanpa Deforestasi¹⁰⁵, namun banyak diantaranya gagal menunjukkan kepada publik bagaimana mereka menerapkan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock Approach/HCSA), suatu metodologi global untuk menerapkan komitmen Tanpa Deforestasi, di semua wilayah pengembangan baru pada tingkat grup. Tidak ada satu pun grup perusahaan yang telah menerbitkan bukti yang menunjukkan bahwa mereka sudah menegakkan moratorium deforestasi dan pembangunan di lahan gambut dalam operasi globalnya dan telah berhasil mewajibkan pemasok pihak ketiganya dan perusahaan di mana mereka memiliki investasi atau usaha pihak ketiga agar melakukan hal yang sama.

Tidak ada satu pun grup perusahaan telah menerbitkan bukti yang menunjukkan bahwa mereka sudah **menegakkan moratorium deforestasi dan pembangunan di lahan gambut dalam operasi globalnya** ataupun berhasil mewajibkan pemasok pihak ketiga berikut perusahaan di mana mereka berinvestasi atau mitra usaha mereka untuk melakukan hal yang sama.



Grup Sinar Mas dan Wilmar International adalah perusahaan besar kehutanan dan agribisnis pertama yang berkomitmen kepada praktik Nol Deforestasi dan sejak tahun 2015 terus mendorong mundur tenggat waktu bagi kepatuhan pemasok pihak ketiganya atau menyatakan tidak mengetahui tentang, atau memiliki kendali terbatas atas, pemasok pihak ketiganya¹⁰⁶. Wilmar telah berkomitmen mengakhiri deforestasi, pembangunan di lahan gambut, dan eksploitasi pada akhir tahun 2020¹⁰⁷. Golden Agri Resources, divisi kelapa sawit Sinar Mas, berkomitmen mencapai ketertelusuran dan bukan mengakhiri deforestasi pada akhir tahun¹⁰⁸. Walaupun adanya komitmen-komitmen tersebut, mereka tidak dapat menerbitkan peta yang menunjukkan jejak hutannya dan efektivitas mekanismenya dalam menegakkan moratorium deforestasi, dan penerapan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA), oleh pemasok pihak ketiga.

Grup Salim belum mengungkapkan informasi mengenai penilaian Stok Karbon Tinggi yang disebutkan telah dilakukan, dan karena itu tidak jelas apakah mereka menerapkan metodologi HCSA, atau menerapkan prosedur yang tepat untuk mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Adat dan masyarakat lokal atas pembangunan di tanah masyarakat¹⁰⁹. Grup Korindo, perusahaan di belakang pembukaan skala besar terhadap hutan primer dan pelanggaran hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang belum lama terjadi¹¹⁰, baru-baru ini mengadopsi komitmen Nol Deforestasi, namun sejauh ini mereka tidak lolos dalam proses penjaminan kualitas HCSA karena tidak dapat melakukan pemetaan partisipatif dengan masing-masing masyarakat pemegang hak dan memperoleh persetujuan melalui prosedur yang dijabarkan dalam persyaratan sosial HCSA¹¹¹.

Kebijakan dan praktik dari sepuluh grup perusahaan kehutanan dan agribisnis ini akan terus berdampak besar terhadap masa depan hutan hujan dan lahan gambut yang tersisa, serta masyarakat Indonesia, dan ujungnya berdampak pada keberhasilan atau kegagalan merek dan bank mengakhiri deforestasi dan pelanggaran hak dari rantai pasok, investasi, dan portofolio finansialnya. **Merek dan bank bertanggung jawab menuntut lebih dari sekelompok raksasa kehutanan dan agribisnis ini dan membuat bisnis aktor-aktor nakal yang tidak mengadopsi dan mematuhi kebijakan NDPE menjadi tidak dapat dipertahankan.**

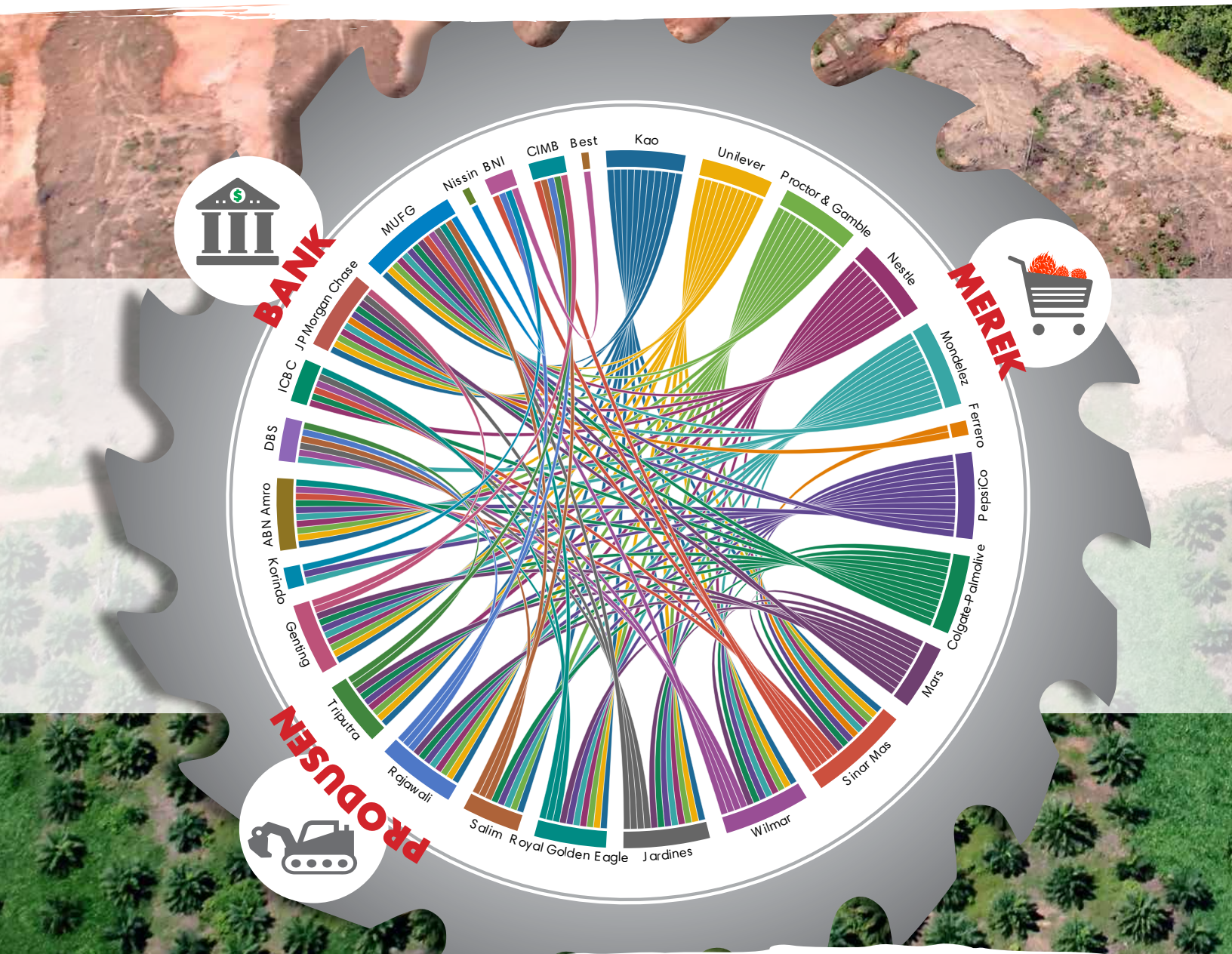
LINGKARAN KEHANCURAN:

Hubungan antara Merek, Bank, dan Raksasa Kehutanan dan Agribisnis

Diagram 3 di bawah ini menunjukkan bagaimana masing-masing merek dan bank saling terkait dan bagaimana perusahaan kehutanan dan agribisnis diketahui secara aktif menyebabkan, atau berkontribusi pada, deforestasi dan pelanggaran HAM di Indonesia. Masing-masing kelompok aktor bertanggung jawab dan bergantung pada peran satu sama lainnya dalam lingkaran kehancuran ini.

Merek-merek terus memasok komoditas murah yang diproduksi atau dijual oleh raksasa kehutanan dan agribisnis ini untuk menghasilkan produk barang konsumen dengan perputaran cepatnya. Merek dapat meningkatkan pangsa pasarnya dan memperluas bisnis manufaktur dan ritelnya ke wilayah baru dengan memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan produk-produk tersebut ditambah aliran pembiayaan dari bank, termasuk diantaranya ABN Amro dan JPMorgan Chase, yang merupakan dua bank terbesar di AS dan Eropa dengan komitmen jangka panjang untuk mengatasi deforestasi.

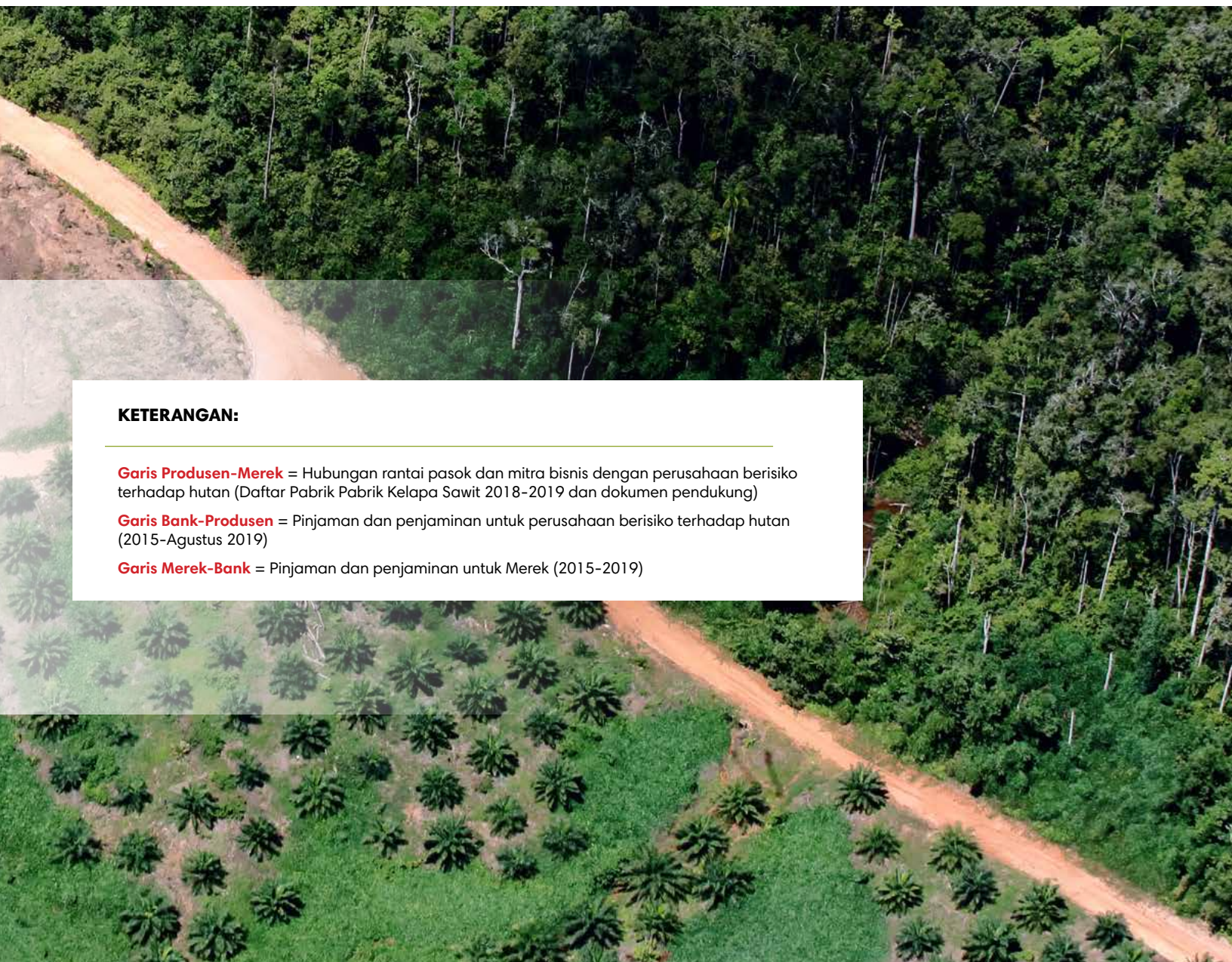
DIAGRAM 3: Hubungan antara Merek, Bank, dan Raksasa Kehutanan dan Agribisnis



Demikian pula, pembiayaan dari bank mendukung perusahaan kehutanan dan agribisnis membayar biaya produksi dan menjamin modal yang dibutuhkan untuk memperluas perkebunan industrial atau membangun jalan baru dan fasilitas pengolahan di kawasan hutan baru di Indonesia, Kongo, dan Amazon. Pembiayaan strategi pertumbuhan ini oleh bank memungkinkan grup perusahaan tersebut menjaga dan memaksimalkan kendalanya terhadap rantai pasok komoditas berisiko terhadap hutan dan memperluas model pengembangan perkebunan skala industri yang sangat cacat ini ke dalam lanskap hutan utuh yang dikelola secara tradisional dan merupakan sisa terakhir di dunia.

Secara kolektif, tindakan dan saling ketergantungan aktor-aktor tersebut memungkinkan terjadinya deforestasi dan pelanggaran HAM. Untuk mengakhiri deforestasi dan kekerasan, intimidasi, dan perampasan tanah yang dialami Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, maka kita harus menetapkan ini sebagai batas terakhir dan membuat 2020 menjadi tahun untuk perubahan, tanpa ada lagi janji yang tidak ditepati.

Gambar ini berdasarkan data 2015-2019



KETERANGAN:

Garis Produsen-Merek = Hubungan rantai pasok dan mitra bisnis dengan perusahaan berisiko terhadap hutan (Daftar Pabrik Kelapa Sawit 2018-2019 dan dokumen pendukung)

Garis Bank-Produsen = Pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan berisiko terhadap hutan (2015-Agustus 2019)

Garis Merek-Bank = Pinjaman dan penjaminan untuk Merek (2015-2019)

2020

TAHUN UNTUK MENJAGA TEGAKAN HUTAN

dan Membela Hak di Hutan Terakhir

Hutan, masyarakat di garis depan kerusakan hutan, dan iklim global kini semakin terancam. Inilah saatnya melindungi apa yang tersisa. Kita harus mengakhiri deforestasi dan ekspansi pembalakan dan perkebunan industrial ke dalam hutan hujan tropis terakhir di Indonesia, Amazon, dan Lembah Kongo, termasuk wilayah yang dimiliki dan dikelola secara tradisional oleh Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Pemerintah harus menjamin hak legal Masyarakat Adat dan lokal atas tanahnya, alih-alih menyerahkan tanah tersebut pada perusahaan untuk produksi kehutanan atau komoditas. Sebaliknya, merek dan bank harus menjalankan komitmennya dan menyelesaikan persoalan yang mereka turut ciptakan.

Merek dengan rantai pasoknya yang luas, serta bank sebagai pemodal, merupakan pendorong utama deforestasi di hutan hujan tropis dan perusakan lahan gambut; kerugian yang disebabkan kepada Masyarakat Adat dan masyarakat lokal saat hak atas tanah mereka diabaikan; dan meningkatnya gangguan terhadap kestabilan iklim dunia. Deretan rak toko-toko dipenuhi jejeran produk yang dihasilkan dengan mengorbankan hutan hujan dan HAM, didukung bank yang memanfaatkan uang publik untuk berinvestasi dalam kerusakan ini.

Merek, bank dan perusahaan raksasa kehutanan dan agribisnis yang disebutkan dalam laporan ini terlibat dalam lingkaran kerusakan dan memiliki tanggung jawab besar terhadap Indonesia dan masyarakat lebih luas. Dengan pengaruh pasarnya, krisis iklim dan keanekaragaman hayati yang semakin memburuk, dan meningkatnya risiko bagi Masyarakat Adat, lokal dan pembela tanah dan lingkungan, maka pemenuhan komitmennya menjadi mendesak. Meneruskan bisnis dengan perusahaan yang terlibat dalam deforestasi dan pelanggaran HAM merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

Dengan bersatu sebagai konsumen dan masyarakat, kita menyerukan pada merek dan bank bahwa hutan yang penuh kehidupan, masyarakat yang sehat, dan iklim stabil lebih bernilai dibandingkan tujuan keuntungan jangka pendek perusahaan. Kami mendesak perusahaan mengakhiri penghancuran hutan hujan, lahan gambut yang kaya akan karbon, dan pelanggaran HAM. Tahun 2020 adalah tahun untuk menjaga tegakan hutan dan menghormati HAM.

Bergabunglah di ran.org/keepforestsstanding.

Tahun 2020 merupakan
tahun untuk **menjaga**
tegakan hutan dan
menghormati HAM.

FOTO: Nanang Sujana / RAN

Masyarakat menjalankan pertanian skala kecil di Kawasan Ekosistem Leuser. FOTO: Paul Hilton / RAN





REFERENSI

Kasuari
FOTO: Paul Hilton

- 1 Forest Peoples Programme. [“Forest Peoples: Numbers Across the World”](#) Forest Peoples Programme. 2012.
- 2 WRI. [“The IPCC Calls for Securing Community Land Rights to Fight Climate Change”](#) Agustus 2019.
- 3 Forest Trends, Supply Change, & Ceres. [“Targeting zero deforestation: company progress on commitments that count, 2019”](#) Forest Trends. 6 Juni 2019.
- 4 Consumer Goods Forum [“Towards Zero net Deforestation”](#). Consumer Goods Forum. Mongabay [“Deforestation in Brazil continues torrid pace in 2020”](#) Mongabay, 9 Februari 2020. Reuters [“World losing battle on 2020 goal to cut deforestation”](#) Reuters. 12 September 2019. Guardian [“Biggest food brands ‘failing goals to banish palm oil deforestation’](#). Guardian, 17 Januari 2020.
- 5 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). [“UN Sustainable Development Goals”](#) PBB. Entitas yang Mengesahkan Deklarasi New York tentang Hutan. [“New York Declaration on Forests”](#) PBB.
- 6 Climate and Land Use Alliance. [Five Reasons The Earth’s Climate Depends On Forests](#). Climate and Land Use Alliance. 2020.
- 7 Idem.
- 8 City Mayors Statistics. [Largest Cities in the World](#). City Mayors Statistics. Maret 2018.
- 9 Center for International Forestry Research. [How Forestry Contributes to SDGs](#). Center for International Forestry Research. 2020.
- 10 Cultural Survival Quarterly Magazine. [Many Things To Many People: Aboriginal Forestry In Canada Is Looking Toward Balanced Solutions](#). Cultural Survival. Maret 1993.
- 11 Center for International Forestry Research. [How Forestry Contributes to SDGs](#). Center for International Forestry Research. 2020.
- 12 The International Union for Conservation of Nature. [Issues Brief: Peatlands and Climate Change](#). IUCN. November 2017.
- 13 Center for International Forestry Research. [“Forests and Biodiversity”](#). CIFOR.
- 14 Potapov et al. [“Mapping the World’s Intact Forest Landscapes by Remote Sensing”](#). Ecology and Society. 2008.13 (2).
- 15 Potapov et al. [“Mapping the World’s Intact Forest Landscapes by Remote Sensing”](#). Ecology and Society. 2008.13 (2). WRI. [“Global Restoration Initiative”](#). WRI.
- 16 Potapov et al. [“Mapping the World’s Intact Forest Landscapes by Remote Sensing”](#). Ecology and Society. 2008.13 (2). Judul Peta: [“Year 2016 Intact Forests Landscapes”](#).
- 17 The Guardian. [“One football pitch lost every second in 2017, data reveals”](#). Guardian. 27 Juni 2018.
- 18 Brancalion et al. [“Global restoration opportunities in tropical rainforest landscapes”](#). Science Advances. 2019. Vol. 5, No. 7.
- 19 Gibbs et al. [By the Numbers: The Value of Tropical Forests in the Climate Change Equation](#). World Resources Institute. 2018.
- 20 The International Union for Conservation of Nature. [Issues Brief: Forests and Climate Change](#). IUCN. November 2017.
- 21 Climate and Land Use Alliance. [Five Reasons The Earth’s Climate Depends On Forests](#). Climate and Land Use Alliance. 2020.
- 22 Mowat dan Veit. [The IPCC Calls for Securing Community Land Rights to Fight Climate Change](#). World Resources Institute. 2019.
- 23 Sobrevila. [“The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation: The Natural but Often Forgotten Partners”](#). The International Bank for Reconstruction and Development / BANK DUNIA. 2008.
- 24 Elliot et al. [Soil to Sky: Climate Solutions that Work](#). California Environmental Associates. 2019.
- 25 Tauli-Corpuz et al. [“A Letter from the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples”](#). Rights and Resources Initiative (RRI). 2018.
- 26 PBB. [United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples](#). PBB. 2007.
- 27 PBB. [United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - Articles](#). PBB. 2007.
- 28 Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. [Free, Prior and Informed Consent](#). FAO. 2020.
- 29 Global Witness. [“Tainted Lands: Corruption In Large-Scale Land Deals”](#). Global Witness. 2016.
- 30 Brown. [“More Than 160 Environmental Defenders Were Killed In 2018. And Many Others Labeled Terrorists And Criminals”](#). The Intercept. 2019.
- 31 [“Geneva Declaration”](#). Zero Tolerance Initiative. November 2019.

- 32 Bullinger. "[Yosemite Finally Reckons with Its Discriminatory Past](#)". Outside Magazine Online. 2018.
- 33 Vidal. "[The tribes paying the brutal price of conservation](#)". The Guardian. 2016.
- 34 Ostrum, Elinor. [Governing the commons](#), Cambridge University Press. 1990.
- 35 Tauli-Corpus et al. [Cornered by Protected Areas](#). Rights and Resources International. 2018.
- 36 "[Commodities](#)". Global Forest Watch. 2020.
- 37 [Human Rights Defenders & Business](#). Business and Human Rights Resource Center. 2020.
- 38 Butt et al. "[The supply chain of violence](#)". Nature Sustainability. Vol. 2. 2019.
- 39 Manongdo, Ping. "[Why attacks on environment defenders should scare big business](#)". Eco-Business. 2019.
- 40 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "The State of Indonesia's Forests 2018" 2018. Mongabay. "[Indonesia: Environmental Profile](#)". Mongabay.
- 41 BRWA. [Sebaran Status Wilayah Adat](#). BRWA. 2019.
- 42 IPBES. "[UN Report: Nature's Dangerous Decline 'Unprecedented'; Species Extinction Rates 'Accelerating'](#)". UN. 2019.
- 43 IUCN. "[IUCN Red List of Threatened Species](#)". IUCN. IUCN "[Tropical Rainforest Heritage of Sumatra](#)". IUCN. WRI "[Indonesia's Last Frontier: 3 Facts to know about Papua](#)". WRI. November 2018.
- 44 WRI. "[Forests and Landscapes in Indonesia](#)". WRI. 2020.
- 45 Environmental Paper Network. "[Conflict Plantations: APRIL](#)". Environmental Paper Network. 2019.
- 46 Environmental Paper Network. "[Conflict Plantations: APP](#)". Environmental Paper Network. 2019.
- 47 Mongabay. "[Deforestation statistics for Indonesia](#)". Sumber Data: Tutupan pohon yang hilang: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA via [Global Forest Watch](#).
- 48 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018". 2018.
- 49 Hergoualc'h, et al. "[Managing peatlands in Indonesia](#)". CIFOR. 2018.
- 50 Mongabay. "[Deforestation statistics for Indonesia](#)". Sumber Data: Tutupan pohon yang hilang: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA via [Global Forest Watch](#).
- 51 IUCN "[IUCN Red List of Threatened Species](#)." Data tentang spesies terancam punah di Indonesia sampai tahun 2018.
- 52 Nater, et al. "[Current Biology. Morphometric, Behavioral, and Genomic Evidence for a New Orangutan Species](#)". Current Biology. Volume 27- edisi 22. 20 November 2017.
- 53 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Buku Basis Data Spasial Kehutanan. 2018.
- 54 Kelapa sawit Watch. "[Kelapa sawit Watch: Perkebunan Kelapa sawit Indonesia Sekitar 21 juta hektar](#)". The Palm Scribe. 14 Agustus 2018. Chain Reaction Research. "[Indonesian Palm Oil Stranded Assets: ten million football fields of undeveloped lands](#)". Chain Reaction Research. 8 Februari 2017.
- 55 Wilmar International. "[Driving transformation](#)". Wilmar International Limited. 2018.
- 56 BPS-Statistics Indonesia. "[Indonesian Oil Palm Statistics 2018](#)". Comparison of Area by Category of Producers. BPS-Statistics. 2019.
- 57 Idem.
- 58 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018". 2018.
- 59 Idem.
- 60 Idem.
- 61 Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan. "[UNODC and KPK pilot a Corruption Risk Assessment in the Forestry Sector in South-Sumatra Province, Indonesia](#)". Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan. Januari 2019. Pachmann, Alec. "[Corruption and Deforestation in Indonesia](#)". Regional Formation and Development Studies, no. 2(25). Mongabay "[What we learned from two years of investigating corrupt land deals in Indonesia](#)". Mongabay. Mei 2019. Environmental Investigation Agency. "[Permitting Crime: How palm oil expansion drives illegal logging in Indonesia](#)". EIA. Desember 2014. mber 2014.
- 62 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018". 2018.
- 63 Idem.
- 64 Ombudsman Republik Indonesia, 'Maladministrasi dalam perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Morowali Utara', 2018; KPK, 2016, '[Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Kelapa sawit](#)'; Laporan Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau, 2015, 'Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi ... Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Perizinan di Provinsi Riau'. Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau, 2015; International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), '[Leaked records reveal offshore's role in forest destruction](#)', 08 November 2017.
- 65 Tuk-Indonesia, Profundo. "[Tycoons in the Indonesian Palm Oil](#)". 2018.
- 66 Bloomberg. [Forest Fire Cost Indonesia \\$5.2 billion in Economic Losses](#). 11 Desember 2019. Bank Dunia, [Cost of Fire](#), 2015.
- 67 Nikkei Asian Review. [Indonesia Law Change Sparks Fears Jokowi is going Soft on Corruption](#). 18 September 2019.
- 68 Mongabay. [Experts see minefield of risk as Indonesia seeks environmental deregulation](#). 11 Februari 2020.
- 69 Tauli-Corpus et al. [Cornered by Protected Areas](#). Rights and Resources International. 2018.
- 70 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional \(RPJMN\) 2015-2019](#). BAPPENAS. 2017.
- 71 Nol net deforestasi adalah istilah yang membiarkan penebangan atau konversi hutan di suatu area selama adanya penanaman kembali dalam jumlah area yang sama di tempat lain. Ini berbeda dengan istilah Nol Deforestasi atau Bebas Deforestasi yang artinya tidak ada hutan yang dapat ditebang atau dikonversi.
- 72 Consumer Goods Forum '[Towards Zero net Deforestation](#)'. Consumer Goods Forum. 2020.
- 73 Forest Trends, Supply Change, & Ceres. "[Targeting zero deforestation: company progress on commitments that count, 2019](#)". Forest Trends. 6 Juni 2019.
- 74 Sebagai contoh lih.: Reuters, "[Norway's wealth fund ditches 33 palm oil firms over deforestation](#)", Februari 2019; lih. juga Banking Environment Initiative / Consumer Goods Forum "[Soft Commodities Compact](#)", Maret 2016; lih. juga BankTrack, "[Citigroup cancels financing of Indonesian food giant Indofood over palm oil labor abuses](#)", 18 Juni 2019.
- 75 TUK Indonesia. "[Tycoons in the Indonesian palm oil](#)". TUK Indonesia. Maret 2019.



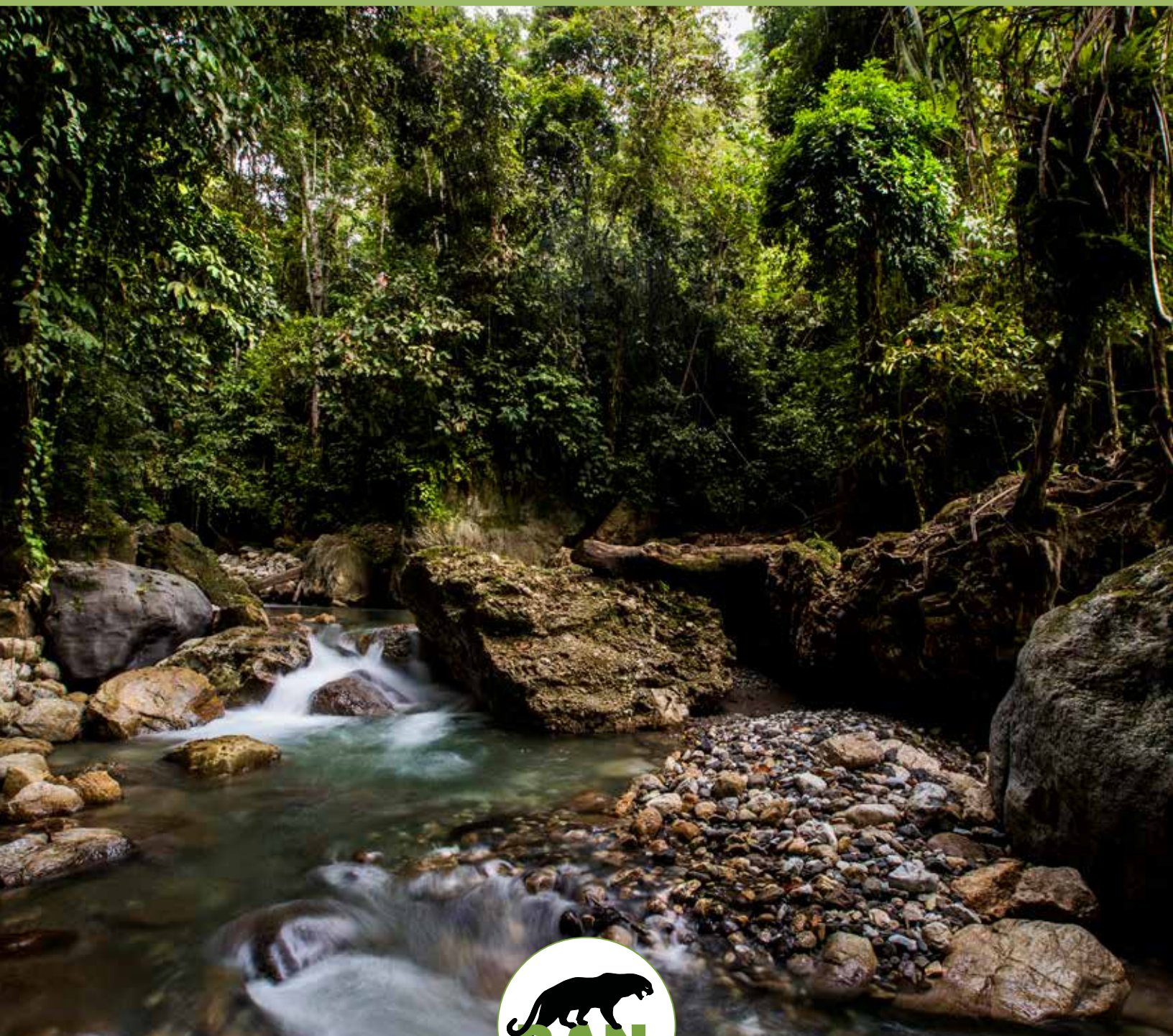
Hutan berikut **masyarakat** yang berada di garis depan kerusakan hutan serta **iklim** global kini semakin terancam.

Sekarang saatnya melindungi yang tersisa.

- 76 Greenpeace, [‘This company promised to stop deforestation. But we caught them out.’](#) Greenpeace. Mei 2018. Mongabay, [‘Revealed: Paper giant’s ex-staff say it used their names for secret company in Borneo,’](#) Mongabay. Juli 2018. AP News, [‘AP Exclusive: Pulp giant tied to companies accused of fires’](#), AP News. Desember 2017. Chain Reaction Research, [“Shadow companies present palm oil investor risks and undermine NDPE efforts.”](#) Chain Reaction Research. Juni 2018. Environmental Paper Network, [“NGOs release statement on 5 year anniversary of Asia Pulp and Papers Forest Conservation Policy.”](#) Environmental Paper Network. 5 Februari 2018. Aidenvironment, [“Palm oil sustainability assessment of Salim-related companies in Borneo peat forests.”](#) Aidenvironment. April 2018.
- 77 Rainforest Action Network, [“The Last of the Leuser Lowlands: Field Investigation Exposes Big Brands Buying Illegal Palm Oil From the Singkil-Bengkung Peatlands.”](#) RAN. September 2019. Rainforest Action Network, [“Major brands again caught sourcing deforestation-linked palm oil.”](#) RAN. Oktober 2019. Greenpeace, [“Burning down the house.”](#) Greenpeace. November 2019. Mighty Earth, [“Rapid Response Palm Oil Reports.”](#) Januari 2020.
- 78 Bloomberg, 2019 Revenues for Colgate-Palmolive, Kao, Mondelēz, Nestlé, Nissin, PepsiCo, Procter & Gamble, and Unilever, accessed February 24, 2020. Forbes, [“Mars,”](#) accessed February 27, 2020. Ferrero, [“Key Figures,”](#) accessed February 27, 2020.
- 79 Roundtable on Responsible Palm Oil, [“Annual Communication of Progress \(ACOP\),”](#) ACOP Progress Reports for Colgate-Palmolive, Ferrero, Kao, Mars, Mondelēz, Nestlé, Nissin, PepsiCo, Procter & Gamble, and Unilever, 2018.
- 80 Mars, [“Deforestation Prevention Overview Policy,”](#) accessed February 26, 2020. Nestle, [“Supply Chain Disclosure,”](#) accessed February 26, 2020.
- 81 Palm Oil Mill Disclosure Lists, accessed January 14, 2020, including the following: Nestlé, [“Supply Chain Disclosure Palm Oil,”](#) August 2019 (snapshot: April 2018); P&G [“2018 Palm Oil Mills,”](#); PepsiCo [“Palm Oil Mill List 2018,”](#); Unilever [“2018 Palm Mills,”](#) January 2019; Mondelez, [“Mills Data,”](#) March 2018; Colgate-Palmolive, [“Colgate Palmolive List of Mills as of June 2018 \(H1 2018\),”](#); Ferrero, [“2019 January - June palm oil supplier mill list,”](#); Mars, [“Traceability I Mill Lists,”](#) Kao, [“2019 Palm Oil Mills.”](#)
- 82 Data Bea Cukai Indonesia. Catatan ekspor selama tahun 2015, 2016, dan 2017.
- 83 Douglas Yu, [“Ferrero completes acquisition of Nestle U.S. candy business, swallowing more than 20 brands.”](#) Confectionarynews.com, 12 April 2018.
- 84 Data Bea Cukai Amerika Serikat.
- 85 TUK Indonesia. [“Tycoons in the Indonesian palm oil.”](#) TUK Indonesia. Maret 2019.
- 86 Grup Best Industry, [“About Us.”](#) Grup Best Industry. Genteng Berhad. [“Annual Reports.”](#) Genteng Berhad. Jardine Matheson Group, [“Our Company.”](#) Astra Agro Lestari. Grup Korindo. [“Our Business.”](#) Korindo. Rajawali Corpora, [“Eagle High Plantations.”](#) Eagle High Plantations. Royal Golden Eagle, [“Our Operations.”](#) APRIL. [“Our Business.”](#) Asian Agri. Grup Salim, [“Plantation Division.”](#) IndoAgri. Grup Sinar Mas, [“Our Business.”](#) Golden Agri Resources. [“Sustainability Report. 2018. Improving Lives.”](#) Sinar Mas APP. Grup Tripura. [“Agribusiness.”](#) Tripura. Wilmar International. [“Driving transformation. Wilmar International Limited. Sustainability Report 2018.”](#) Semua diakses pada tanggal 25 Februari 2020. Aidenvironment. [“Nordic investments in banks financing Indonesian palm oil.”](#) Aidenvironment. Mei 2017.
- 87 Chain Reaction Research. [“Unsustainable palm oil faces increasing market access risks.”](#) Chain Reaction Research. 1 November 2017.
- 88 Wilmar International. [“Driving transformation. Wilmar International Limited. Sustainability Report 2018.”](#)
- 89 Chain Reaction Research. [“Unsustainable palm oil faces increasing market access risks.”](#) Chain Reaction Research. 1 November 2017.
- 90 Chain Reaction Research. [“Indonesian Palm Oil Stranded Assets: ten million football fields of undeveloped lands.”](#) Chain Reaction Research. 8 Februari 2017.
- 91 Chain Reaction Research. [“Indonesian Palm Oil Stranded Assets: ten million football fields of undeveloped lands.”](#) Chain Reaction Research. 8 Februari 2017. Chain Reaction Research. [“Unsustainable palm oil faces increasing market access risks.”](#) Chain Reaction Research. 1 November 2017.
- 92 Asia Pulp and Paper Sinar Mas. [“Sustainability Report 2018. Improving Lives.”](#) APP Sinar Mas. APRIL. [“About APRIL. Our Operations.”](#)
- 93 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Buku Basis Data Spasial Kehutanan. 2018.
- 94 Golden Agri Resources (GAR). [“About GAR. Our business.”](#) GAR. APICAL. [“APICAL Group. Leading Asian palm Oil Exporter.”](#) APICAL. Asian Agri. [“Asian Agri Our Business.”](#) Asian Agri.
- 95 Royal Golden Eagle. [“Forestry, Fibre, Pulp & Paper Sustainability Framework.”](#) 9 Oktober 2017. Asia Pulp and Paper Sinar Mas. [“Sustainability Commitment.”](#) Asia Pulp and Paper Sinar Mas. Golden Agri Resources. [“Social and Environmental Policy.”](#) GAR. Wilmar. [“No Deforestation, No Peat and No Exploitation Policy. Updated November 2019.”](#) Wilmar. November 2019.
- 96 Aidenvironment. [“Nordic investments in banks financing Indonesian palm oil.”](#) Aidenvironment. Mei 2017.
- 97 Genteng Berhad, [“Annual Reports.”](#) Genteng Berhad. Greenpeace. [“Burning down the house.”](#) Greenpeace. November 2019. Mighty Earth. [“Rapid Response Palm Oil Reports.”](#)



- 98 Rajawali Corpora, "[Eagle High Plantations](#)." Eagle High Plantations. Greenpeace. "[Burning down the house](#)." Greenpeace. November 2019. Mighty Earth. "[Rapid Response Palm Oil Reports](#)." Chain Reaction Research. "[Indonesian Palm Oil Stranded Assets: ten million football fields of undeveloped lands](#)." Chain Reaction Research. 8 Februari 2017.
- 99 Grup Triputra. "[Agribusiness](#)." Triputra. Chain Reaction Research. "[Triputra Agro Persada Risk Assessment](#)." Mei 2015.
- 100 Greenpeace. "[Burning down the house](#)." Greenpeace. November 2019. Mighty Earth. "[Rapid Response Palm Oil Reports](#)." TUK Indonesia. "[Tycoons in the Indonesian palm oil](#)." TUK Indonesia. Maret 2019.
- 101 Grup Jardine Matheson, "[Our Company](#)." Astra Agro Lestari.
- 102 Indoagri. "[How we manage Sustainability](#)" IndoAgri.
- 103 Idem.
- 104 Chain Reaction Research. "[Salim Group acquires four concessions in Papua](#)." The Chain. 13 Juni 2016. "[The Salim Group and land conflicts around West Papua](#)." Tracking the Merauke Integrated Food and Energy Estate. 7 Februari 2018.
- 105 Pendekatan Stok Karbon Tinggi. "[Members](#)." Pendekatan Stok Karbon Tinggi.
- 106 Koalisi Anti Mafia Hutan. "[APP acknowledges links to controversial suppliers but fails to release an auditors report](#)." Koalisi Anti Mafia Hutan. May 2019.
- 107 Wilmar. "[Wilmar launches new ambitious plan to accelerate NDPE implementation](#)." Wilmar. Oktober 2018.
- 108 Golden Agri Resources. "[Seeds of Growth](#)." GAR. 2018.
- 109 Indoagri. "[Sustainability Report 2018](#)". Indoagri. Pendekatan Stok Karbon Tinggi. 2018; "[Registered HC&SA Assessments](#)." Pendekatan Stok Karbon Tinggi. 2018.
- 110 Walhi, TUK Indonesia, Profundo and Rainforest Action Network. "[Malapetaka: Korindo, Perampasan Tanah & Bank](#)" RAN. November 2018. Forest Stewardship Council. "[Retrospective Review of Korindo HCV](#)." Februari 2019. Forest Stewardship Council. "[Additional social analysis Korindo Group](#)" February 2019.
- 111 Pendekatan Stok Karbon Tinggi. "[Peer Review Report](#)." Pendekatan Stok Karbon Tinggi. Oktober 2018.



Rainforest Action Network
425 Bush Street, Suite 300 | San Francisco, CA 94108 | RAN.org

DIPUBLIKASIKAN PADA: MARET, 2020

Sungai yang bebas mengalir di Kawasan Ekosistem Leuser, Sumatra, Indonesia.
FOTO: Paul Hilton / RAN